

**POTENSI DAN ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH**

**(Studi Kasus di Kota Semarang)**

**TESIS**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2**



**Program Studi  
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan**

**Disusun Oleh :**

**MUHAMAD MASROFI**

**NIM C4B001132**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2004**

**TESIS**  
**POTENSI DAN ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG**  
**MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAN**  
**RETRIBUSI DAERAH**

**(Studi Kasus di Kota Semarang)**

Disusun Oleh :

**MUHAMAD MASROFI**

NIM. C4B001132

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Pada tanggal 17 Pebruari 2004  
Dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

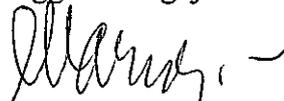
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Suyudi Mangunwihardjo

Anggota Penguji



Drs. Waridin, MS.PhD.

Pembimbing Pendamping



Dra. Tri Wahyu R. MSi.



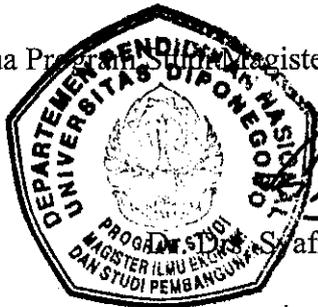
Drs. Edy Yusuf AG, MSc.



Drs. Nugroho S.B.M., MT.

Semarang,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan



Safrudin Budiningharto, SU.

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Pebruari 2004

Muhamad Masrofi, S.Sos.

## ABSTRACT

This research be motivated by reality that tax income and potencial regional retribution in the periode of regional autonomy. Typical of tax and regulation have been changed during last of 20 years, in a row with change the regulation of the tax and regional retribution. That's mean Government of Semarang City must be concentrade for potencial resources of two typical of those.

The aim of this research is to be indentified some factors which influence of tax income and regional retribution, also to analyzes what kind of factors which influence income of tax and regional retribution, and to analys typical tax and regional retribution which potencial to develop.

Empirical result of this analysis showed that's real variables of PDRB and total people's there has positive correlation and significant to income of tax and regional retribution on Semarang city. But variables inflation and regulation of change (Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997) insignificant. Beside this, find of research major tax kind category are Tax of Traffic Light, Hotels Tax and Restaurant. But potencial tax category are Poverty Tax. For potencial retribution kind category are Permitted Retribution, Hospital Retribution, Clinic and People Healthy Centre, Park Retribution, Rubbish and Clean Retribution Program etc.

**Key Words :** Tax, Retribution and Overlay Analysis.

## ABSTRAKSI

Penelitian ini dimotivasi dari kenyataan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang potensial dalam era otonomi daerah. Jenis pajak dan retribusi daerah ini juga mengalami perubahan selama kurun waktu 20 tahun terakhir, sejalan dengan perubahan peraturan mengenai pajak dan retribusi daerah. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kota Semarang harus dapat dengan cermat melihat potensi yang dimiliki dari dua sumber pendapatan daerah ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah, menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah serta menganalisis jenis pajak dan retribusi daerah yang potensial untuk dikembangkan.

Hasil Analisis menunjukkan bahwa variabel PDRB Riil dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Semarang. Sedangkan variabel inflasi dan perubahan peraturan (Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997) tidak signifikan. Selain itu hasil temuan dari penelitian ini untuk jenis pajak yang dikategorikan prima adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Restoran, sedangkan yang termasuk jenis pajak potensial adalah Pajak Pembangunan. Untuk jenis retribusi yang dikategorikan potensial adalah Retribusi Pangkalan, Retribusi Ijin Bangunan, Retribusi Rumah Sakit, Balai Pengobatan dan Puskesmas, Retribusi Parkir, Retribusi Sampah dan Kebersihan lainnya.

**Kata Kunci** : Pajak, Retribusi dan Analisis Overlay.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkah dan perkenan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul “ **Potensi dan Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pajak dan Retribusi Daerah (Studi Kasus di kota Semarang)** ”. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Suyudi Mangunwihardjo, selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penelitian ini dibuat;
2. Dra. Tri Wahyu R, M.Si, selaku Pembimbing Tesis yang penuh dengan pengertian telah memberikan arahan bagi penulisan tesis ini;
3. Staf Pengajar Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis;
4. Keluarga, istri dan anak-anakku atas dorongan moral serta curahan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan lancar;
5. Semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk terselesaikannya penulisan tesis ini.

Semoga segala kebaikan, dorongan dan bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya segala kritik dan saran akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya segala kebenaran yang terkandung di dalam tulisan ini semata-mata hanyalah berkat kemurahan-Nya dalam menuntun penulis menuju kebenaran. Sedangkan segala kesalahan yang ada, sepenuhnya bersumber dan menjadi tanggung jawab penulis.

Semarang, Pebruari 2004.

Penulis,

Muhamad Masrofi

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
ABSTRACT .....	iv
ABSTRAKSI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS</b>	
2.1 Tinjauan Pustaka .....	12
2.1.1 Potensi dan Pendapatan Asli Daerah .....	13
2.1.2 Konsep Perpajakan .....	17
2.1.3 Pajak Daerah .....	20
2.1.4 Konsep Retribusi .....	22
2.1.5 Retribusi Daerah .....	23
2.1.6 Undang-Undang No. 18 Tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	25
2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi .....	27
2.1.8 Pajak Domestik Regional Bruto .....	28
2.1.9 Inflasi .....	29

2.1.10	Jumlah Penduduk .....	29
2.1.11	Perubahan Peraturan Perpajakan .....	30
2.2	Penelitian / Studi Terdahulu .....	31
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis .....	34
2.4	Hipotesis .....	36
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	38
3.3	Model dan Alat Analisis .....	38
3.3.1	Model Analisis Regresi Berganda .....	38
3.3.2	Alat Analisis Data .....	40
3.3.2.1	Uji Asumsi Klasik .....	40
3.3.2.2	Analisis Klasifikasi Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	44
3.3.2.3	Analisis Proyeksi .....	48
3.4	Definisi Operasional Variabel .....	49
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN</b>	
4.1	Letak Geografis dan Batas Wilayah .....	51
4.2	Luas Wilayah .....	51
4.3	Jumlah Penduduk .....	52
4.4	Mata Pencaharian Penduduk .....	53
4.5	Struktur Perekonomian .....	55
4.6	Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah .....	56
<b>BAB V</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1	Analisis Regresi .....	62
5.1.1	Penerimaan Pajak Daerah .....	62
5.1.1.1	Pengujian Asumsi Klasik .....	62
5.1.1.2	Pengujian Model .....	68

5.1.2	Penerimaan Retribusi Daerah .....	70
5.1.2.1	Pengujian Asumsi Klasik .....	70
5.1.2.2	Pengujian Model .....	75
5.2	Analisis Overlay .....	77
5.2.1	Pajak Daerah .....	77
5.2.2	Retribusi Daerah .....	80
5.3	Proyeksi .....	83

## **BAB VI PENUTUP**

6.1	Simpulan .....	87
6.2	Saran .....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Proporsi Penerimaan Daerah Terhadap Total APBD Kota Semarang Tahun 1997/1998 – 2001 ..... 4
Tabel 1.2	Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 1996/1997 – 2000/2001 ..... 7
Tabel 2.1	Penelitian / Studi Terdahulu ..... 31
Tabel 3.1	Komposisi Kontribusi dan Pertumbuhan Dalam Analisis Overlay .. 46
Tabel 4.1	Luas Kecamatan dan Prosentase Luas Tanah Terhadap Luas Kota Semarang ..... 52
Tabel 4.2	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang ..... 53
Tabel 4.3	Prosentase Penduduk Menurut Mata Pencarian di Kota Semarang Tahun 2001 ..... 54
Tabel 4.4	Distribusi Prosentase PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Konstan 1993 ..... 55
Tabel 4.5	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Konstan 1993 ..... 56
Tabel 4.6	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 1996/1997 – 2000/2001 ..... 57
Tabel 4.7	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 1996/1997 – 2000/2001 ..... 58
Tabel 4.8	Penerimaan Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 1998/1999 – 2002 ..... 59
Tabel 4.9	Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 1998/1999 – 2002 ..... 61
Tabel 5.1	Pengujian Multikoleniaritas ..... 63
Tabel 5.2	Pengujian Kolmogorov Smirnov..... 64
Tabel 5.3	Pengujian Heterokesdastisitas ..... 64

Tabel 5.4	Pengujian Model .....	68
Tabel 5.5	Pengujian Multikoleniaritas .....	71
Tabel 5.6	Pengujian Kolmogorov Smirnov.....	71
Tabel 5.7	Pengujian Heterokedastisitas .....	72
Tabel 5.8	Pengujian Model .....	75
Tabel 5.9	Perhitungan Overlay Untuk Pajak Daerah .....	79
Tabel 5.10	Perhitungan Overlay Untuk Retribusi Daerah .....	81
Tabel 5.11	Proyeksi Pajak Daerah Yang Prima dan Potensial .....	85
Tabel 5.12	Proyeksi Retribusi Daerah Yang Potensial .....	86

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	36
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang
- Lampiran 2 Perhitungan Pajak Riil Kota Semarang
- Lampiran 3 Perhitungan Pajak Riil Perubahan Tahun Anggaran ke Tahun Kalender Kota Semarang Periode 1983 – 2002
- Lampiran 4 Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah
- Lampiran 5 Perhitungan Pertumbuhan Pajak Riil
- Lampiran 6 Perhitungan Pertumbuhan Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan seluruh Pajak
- Lampiran 7 Penerimaan Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun 1983 – 2002
- Lampiran 8 Retribusi Riil Kota Semarang 1983 – 2002
- Lampiran 9 Retribusi Tahun Anggaran – Kalender Kota Semarang 1983 – 2002
- Lampiran 10 Perhitungan Kontribusi Retribusi Kota Semarang 1983 – 2002
- Lampiran 11 Perhitungan Pertumbuhan Retribusi Daerah terhadap Total Pertumbuhan Retribusi Daerah Kota Semarang 1983 – 2002
- Lampiran 12 Tabel data-data dalam Perhitungan
- Lampiran 13 Hasil Estimasi Regresi Pajak Daerah
- Lampiran 14 Uji Multikolinearitas
- Lampiran 15 Uji Normalitas
- Lampiran 16 Uji Heterokedasititas
- Lampiran 17 Hasil Estimasi Regresi Retribusi Daerah
- Lampiran 18 Uji Multikolinearitas
- Lampiran 19 Uji Normalitas

- Lampiran 20 Uji Heterokedasititas
- Lampiran 21 Perhitungan Proyeksi Pajak Penerangan Jalan
- Lampiran 22 Grafik Perkembangan Pajak Penerangan Jalan
- Lampiran 23 Perhitungan Proyeksi Pajak Hotel dan Restoran
- Lampiran 24 Grafik Perkembangan Pajak Hotel dan Restoran
- Lampiran 25 Perhitungan Proyeksi Retribusi Pasar
- Lampiran 26 Grafik Perkembangan Retribusi Pasar
- Lampiran 27 Perhitungan Proyeksi Retribusi Sampah
- Lampiran 28 Grafik Perkembangan Retribusi Sampah
- Lampiran 29 Perhitungan Proyeksi Retribusi Parkir
- Lampiran 30 Grafik Perkembangan Retribusi Parkir
- Lampiran 31 Perhitungan Proyeksi Retribusi Rumah Sakit
- Lampiran 32 Grafik Perkembangan Retribusi Rumah Sakit
- Lampiran 33 Perhitungan Proyeksi Retribusi IMB
- Lampiran 34 Grafik Perkembangan Retribusi IMB

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi ditandai dengan lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan diberlakukannya Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, membawa implikasi yang mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggungjawab lembaga serta aparatur pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Pembangunan Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Permasalahan dan tantangan pembangunan di daerah, akan semakin berat dan kompleks sejalan dengan laju pembangunan menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Kemampuan untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan akan sangat tergantung pada kemampuan dan kesiapan daerah didalam menyusun perencanaan pembangunannya.

Perencanaan pembangunan ekonomi yang diwujudkan dalam kebijaksanaan mengenai pertumbuhan daerah secara umum merupakan kombinasi antara kebijaksanaan (*policy*) baik kebijaksanaan pusat maupun daerah di satu pihak, dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan di pihak

lain. Wacana baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah tuntutan masyarakat untuk terwujudnya aparatur pemerintah yang demokratis, netral, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Berlakunya produk hukum mengenai pemerintah daerah tersebut membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan tugas tersebut merupakan tantangan, karena dituntut adanya kemampuan ekonomi yaitu pertama, tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan finansial untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat; kedua, adalah bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan perekonomian daerah (Riant, 2000:109).

Dari uraian yang disampaikan diatas bahwa ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Menurut Kaho (1997:124), untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Pemerintah daerah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara *value for money* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus dapat ditekan seminimal mungkin. Berkurangnya tingkat ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat maka pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar. Kegiatan ini hendaknya didukung juga oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan negara (Endang, 2000:50).

Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang syah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari : (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang syah, diharapkan menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyaknya kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah dan semakin tinggi tingkat kemandirian dalam bidang keuangan daerahnya (Ibnu , 1987:213).

Dalam proses menuju kemandirian , terutama dari segi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dirasakan masih kurang. Hal ini tercermin dari peranan pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dirasakan masih rendah, khususnya untuk pendapatan asli daerah kabupaten/kota. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hirawan, bahwa selama ini pendapatan asli daerah secara keseluruhan masih merupakan bagian yang relatif kecil dan bahkan hanya sekitar 4% dari keseluruhan penerimaan negara (Insukindro, dkk., 1994:2). Sebagai contoh, proporsi penerimaan daerah terhadap APBD di Kota Semarang selama kurun waktu 1997/1998 sampai tahun 2001 dapat dilihat dalam Tabel 1.1. sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Proporsi Penerimaan Daerah terhadap Total APBD**  
**Kota Semarang Tahun 1997/1998 – 2001**

No	Uraian	Tahun 1997/1998	Tahun 1998/1999	Tahun 1999/2000	Tahun 2000	Tahun 2001
I	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	0,03%	2,14 %	3,75 %	4,07 %	4,23 %
II	Pendapatan Asli Daerah	28,22 %	23,56 %	25 %	21,17 %	19,07 %
	a. Pajak Daerah	13,39 %	13,11 %	14,01 %	13,00 %	10,94 %
	b. Retribusi Daerah	11,40 %	7,47 %	6,78 %	6,50 %	5,21 %
	c. Bagian Laba Usaha Daerah	0,44 %	0,45 %	0,87 %	0,03 %	0,04 %
	d. Penerimaan Dinas	2,20 %	1,53 %	0 %	0,00 %	0 %
	d. Penerimaan Lain-lain	0,78 %	1,02 %	3,34 %	0,00 %	0 %
	e. Lain-lain Pendapatan				1,64 %	1,76 %
III	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	10,52 %	10,22 %			
IV	Bagian Sumbangan dan Bantuan	41,62 %	39,72 %			
V	Bagian Penerimaan Pembangunan	5,83%	0,79 %			
	Urusaan Kas dan Perhitungan	13,79 %	23,56 %			
	<b>Jumlah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
III	Bagian Pendapatan Yang Berasal Dari Pemerintahan Yang Lebih Tinggi			58,26 %		
	a. Bagi Hasil Pajak			11,33 %		
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak			0,80 %		
	c. Subsidi Daerah Otonom			36,92 %		
	d. Bantuan Pembangunan			9,00 %		
	e. Penerimaan Lainnya			0,21 %		
IV	Pinjaman Pemerintah Daerah			1,74 %		
	Urusan kas dan Perhitungan			11,25 %		
	<b>Jumlah</b>			<b>100 %</b>		
III	BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI				71,45 %	69,96 %
	a. Bagi Hasil Pajak				14,30 %	12,23 %
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak				0,54 %	0,33 %
	c. Dana Rutin Daerah				32,95 %	0,00 %
	d. Pos Dana Pembangunan Daerah				17,98 %	0,00 %
	e. Dana Alokasi Umum				5,68 %	56,67 %
	f. Dana Alokasi Khusus				0,00 %	0,72 %
	g. Dana Darurat				0,00 %	0,00 %
IV	BAGIAN PINJAMAN DAERAH				0,00 %	2,01 %
V	Bagian Lain-lain Penerimaan Yang Sah				0,14 %	4,74 %
	<b>J u m l a h</b>				<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Kota Semarang Dalam Angka 1997 - 2001, Diolah.

Dari tabel 1.1. dapat dilihat bahwa total PAD terhadap APBD dalam kurun waktu 1997 –2001 relatif kecil. Peranan Bantuan dari Pemerintah Pusat masih cukup tinggi, dimana pada tahun 2000 mencapai 71,45 % dan tahun 2001 sebesar 69,96 %. Pada tahun 1997 –2001 proporsi PAD terhadap APBD hanya berkisar 19 % - 28 % dan tahun 2000 PAD hanya menyumbang 21,17 %, dimana pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 13 % dan retribusi memberikan kontribusi sebesar 6,50 %. Tahun 2001, kontribusi PAD terhadap total APBD mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 19,07 %, dimana pajak daerah menyumbang 10,94 % terhadap total APBD dan retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 5,21 % terhadap total APBD.

Komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak dan retribusi daerah. Apabila tidak memperhatikan dan mengelola pajak dan retribusi daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut, karena baik pajak atau retribusi daerah tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah yang optimal.

Reformasi pajak , sebagai bagian dari reformasi ekonomi di Indonesia, merupakan suatu usaha untuk mengelola sumber-sumber keuangan negara. Secara umum, reformasi pajak adalah proses perubahan atas sistem (perpajakan) yang ada, yang tidak atau kurang sesuai dengan kondisi yang berkembang

mengarah pada sistem yang lebih baik. Proses reformasi perpajakan di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai macam undang-undang yang mengatur masalah perpajakan. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 17,18,19,20 dan 21 tahun 1997. Dari berbagai macam Undang-undang tentang perpajakan tersebut, begitu juga jika dibandingkan dengan Undang-undang perpajakan yang ada sebelumnya, UU No 18 tahun 1997 merupakan UU yang memiliki arti dan dampak yang cukup besar terhadap penerimaan daerah. Undang-undang No 18 tahun 1997 ini mengatur kembali tentang pajak dan retribusi daerah dimana terdapat berbagai macam perubahan item-item sumber-sumber penerimaan daerah. Mengingat pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah, maka dengan berlakunya UU No 18 tahun 1997 ini akan memiliki dampak yang cukup penting terhadap penerimaan masing-masing daerah di Indonesia. Namun dengan berlakunya UU no 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kemudian dikeluarkan UU No 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Namun perubahan dimaksud, sifatnya tidak mendasar dan tidak begitu banyak merubah sumber Penerimaan Baik untuk Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dari sektor pajak dan retribusi.

Dengan berlakunya undang-undang mengenai pajak dan retribusi daerah tersebut, peran pemda dalam pengelolaan anggaran pembangunan menjadi lebih besar, dapat pula dikatakan terjadi transfer fiskal dari Pusat ke Daerah. Artinya

kebijakan alokasi anggaran yang tadinya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kemudian dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Kota Semarang merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki potensi yang besar dilihat dari struktur perekonomian, jumlah penduduk dan fasilitas sarana-prasarana pendukung lainnya. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka Kota Semarang dapat dijadikan sebagai barometer/ ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Propinsi Jawa Tengah. Dengan potensi yang dimiliki, Pemerintah Kota Semarang telah berupaya terus-menerus meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan berbagai cara seperti memperluas cakupan pungutan pajak dan retribusi, efisiensi biaya pemungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan daerah. Perkembangan realisasi pendapatan asli daerah Kota Semarang selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel 1.2 :

**Tabel 1.2. :**  
**Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang**  
**Tahun Anggaran 1996/1997 s/d 2000/2001**  
**(dalam rupiah)**

No.	Tahun Anggaran	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Penerimaan Lain-lain	Total P A D
1	1996/1997	359.505.157 (61,72 %)*	215.574.369 (37,01%)*	7.352.487 (1,27%)*	582.432.013 (100%)
2	1997/1998	713.007.090 (79,18%)*	185.339.024 (20,58%)*	2.125.070 (0,24%)*	900.471.184 (100%)
3	1998/1999	737.642.014 (62,14%)*	446.271.038 (37,59%)*	3.219.173 (0,27%)*	1.187.132.225 (100%)
4	1999/2000	2.323.889.067 (74,04%)*	667.985.219 (21,28%)*	146.839.488 (4,68%)*	3.138.713.774 (100%)
5	2000/2001	2.913.374.624 (55,17%)*	1.763.928.494 (33,40%)*	603.347.240 (11,43%)*	5.280.650.358 (100%)

Sumber : Kantor DIPENDA Kota Semarang, Laporan Realisasi PAD beberapa terbitan (data diolah).

\* Kontribusi terhadap Total PAD

Dari Tabel 1.2. dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) selama periode 5 tahun anggaran Kota Semarang cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun anggaran 1997/1998 retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 14,1%, akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap total penerimaan PAD pada tahun anggaran yang bersangkutan. Peningkatan PAD Kota Semarang ini merupakan dampak dari pesatnya perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah. Namun untuk mengetahui sejauhmana peningkatan itu terjadi, perlu dibuat pengkajian mengenai penerimaan PAD dari jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Kota Semarang.

Dengan melihat kondisi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah maka perlu dilihat apakah ada pengaruh antara kondisi-kondisi makro ekonomi ( variabel ekonomi) dan perubahan peraturan ( reformasi perpajakan) terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Semarang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah Kota Semarang diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar, dalam arti bahwa seluruh potensi yang ada didayagunakan untuk menggali sumber-sumber pendapatan agar pendapatan daerah dapat selalu meningkat. Namun yang perlu diperhatikan bahwa penggalian sumber dana ini tidak

memberikan dampak ekonomi yang negatif (ekonomi biaya tinggi, penurunan daya beli masyarakat, dan lain-lain ) dan memperhatikan aspek keadilan serta kemampuan masyarakat.

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang adalah bahwa sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan APBD masih rendah, dimana rata-rata terjadi penurunan dalam kurun waktu 1997 sampai dengan 2001. Tahun 1997/1998 kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total APBD adalah sebesar 28,22 %, tahun 1998/1999 sebesar 23,56 %, tahun 1999/2000 sebesar 25 %. Pada tahun 2000 kontribusinya 21,17 % dan turun lagi menjadi 19,07 % pada tahun 2001. Sumbangan terbesar dalam penerimaan APBD masih bersumber dari sumbangan dan bantuan dari Pemerintah/Instansi yang lebih tinggi.

Pajak dan Retribusi Daerah memberikan sumbangan/kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang, sehingga penanganan Pajak dan Retribusi Daerah memerlukan perhatian yang lebih dari Pemerintah Kota Semarang. Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak mungkin lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini akan mengungkap beberapa pertanyaan :

1. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di kota Semarang

2. Apa saja jenis pajak dan retribusi daerah yang potensial untuk dikembangkan
3. Bagaimana proyeksi dari masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah yang potensial di Kota Semarang

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah
2. Menganalisis jenis pajak dan retribusi daerah yang potensial untuk dikembangkan termasuk proyeksinya.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kota Semarang dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Sebagai landasan, bahan informasi atau referensi untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

3. Mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai landasan untuk pengambilan kebijaksanaan di Kota Semarang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

#### 2.1. Tinjauan Pustaka

Menurut Panglima (1996:37-38), pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di berbagai daerah, maka dicanangkanlah program pembangunan sesuai dengan daerah masing-masing. Keseluruhan program pembangunan daerah tersebut dijabarkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Konsentrasi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan daerah adalah sejalan dengan semangat otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi.

Ada 2 (dua) konsep dasar mengenai desentralisasi, yaitu desentralisasi politis dan desentralisasi manajemen (Devas, 1989:352-353). Desentralisasi politis yaitu transfer wewenang dan tanggungjawab kepada pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena dipandang bahwa pemerintah daerah lebih dekat kepada warga negara sehingga mampu membuat keputusan yang mencerminkan kebutuhan dan prioritas, sedangkan yang dimaksud dengan desentralisasi manajemen yaitu praktek pendelegasian wewenang dan tanggungjawab dari pusat-pusat biaya kepada manajer unit.

Desentralisasi pemerintah dan desentralisasi keuangan pemerintah merupakan suatu tujuan yang penting di banyak negara sedang berkembang dan

bahwa kabupaten atau kota lebih memungkinkan untuk lebih dekat dengan masyarakat, sehingga dapat mengetahui kebutuhan masyarakat dan pelayanan yang perlu disediakan untuk masyarakat. Akibatnya masyarakat juga memiliki kesadaran untuk membayar pajak sebagai kontribusinya, karena jumlah yang dibayarkan kepada pemerintah langsung terlihat hasilnya.

Keterbatasan dana dari pemerintah pusat bagi pembangunan daerah dan dalam rangka penggalan potensi daerah memerlukan strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah bagi setiap daerah. Strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan daerah bagi peningkatan pendapatan asli daerah antara lain adalah (1) strategi yang berkaitan dengan manajemen pajak atau retribusi daerah, (2) strategi ekstensifikasi sumber penerimaan daerah, dan (3) strategi dalam rangka peningkatan efisiensi institusi.

#### **2.1.1. Potensi Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pasal 79 dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
  - a. Hasil pajak daerah,
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Hasil Perusahaan Daerah, pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

- d. Dan lain-lain pendapatan asli daerah lainnya
2. Dana Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, terdiri dari :
  - a. Bagi hasil (bagian daerah) dari pajak bumi dan bangunan, bea peralihan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan sumber daya alam;
  - b. Dana Alokasi Umum,
  - c. Dana Alokasi Khusus
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Pendapatan daerah yang syah.

Selanjutnya Mardiasmo dan Makhfatih ( 2000:8 ) telah pula menguraikan bahwa :

“Potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel kebijakan dan kelembagaan) dan yang tidak dapat dikendalikan (variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah”.

Beberapa variabel yang perlu dianalisis untuk mengetahui potensi sumber-sumber penerimaan daerah adalah :

1. Kondisi awal suatu daerah; keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah menentukan besar kecilnya keinginan pemerintah untuk menetapkan pungutan-pungutan daerah. Yang berbasis pertanian tentunya kemampuan membayar pungutan akan berbeda dengan yang berbasis industri. Untuk yang berbasis pertanian mempunyai

kemampuan membayar pungutan sangat rendah, sementara daerah yang berbasis industri mempunyai kemampuan untuk membayar pajak yang cukup tinggi

2. Peningkatan cakupan penerimaan daerah; ada 3 hal penting yang harus diperhatikan :
  - a. Menambah obyek pajak dan subyek pajak dan retribusi daerah
  - b. Meningkatkan besaran penetapan pajak dan retribusi potensial sesuai dengan potensi sebenarnya
3. Perkembangan PDRB perkapita riil, semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah, berarti semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah semakin besar potensi penerimaan daerah.
4. Pertumbuhan penduduk; dalam hal tertentu besarnya pendapatan dapat dipengaruhi langsung oleh penduduk. Apabila jumlah penduduk naik, maka pendapatan yang akan dihasilkan juga naik, tetapi penambahan penduduk bisa saja tidak proporsional mempengaruhi pertumbuhan pendapatan.
5. Penyesuaian tariff; meningkatnya pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tariff. Untuk pajak dan retribusi yang tarifnya ditentukan tetap (flat) maka dalam penyesuaian tariff retribusi dasar selain harus mempertimbangkan laju inflasi, juga perlu ditinjau hubungan antara biaya pelayanan dan jasa penerimaan pendapatan

6. Tingkat Inflasi. Inflasi akan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan.
7. Pengembangan Baru; penambahan pendapatan juga diperoleh melalui pembangunan-pembangunan baru di segala sektor.
8. Sumber-sumber pendapatan baru : adanya kegiatan usaha baru, tentunya akan menambah sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah yang telah ada
9. Perubahan peraturan; adanya perubahan peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah

Dari uraian di atas dapat diketahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sumber penerimaan daerah, diantara faktor-faktor itu ada perkembangan PDRB perkapita riil, jumlah penduduk serta inflasi dan perubahan peraturan.

Wahyu (1994:32) menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan penerimaan semua sumber pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya.

Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber obyek retribusi atau pajak, ataupun dengan menjangkit wajib pajak baru.

### **2.1.2. Konsep Perpajakan**

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada didalam negara itu (natural resources) Para ahli perpajakan memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti dan tujuan yang sama. Munawir (1997:5) mengutip pendapat Jayadiningrat memberikan definisi pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, akan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Selanjutnya Rochmat (1990:2) mengemukakan, bahwa pajak merupakan peralihan uang (harta) dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah tanpa ada imbalan secara langsung dapat ditunjuk. Guritno (2001:181) menyatakan bahwa pajak adalah suatu pungutan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak dimana tidak dapat balas jasa secara langsung terhadap penggunaannya.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung didalam pengertian pajak yaitu :

1. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara dimana dapat diartikan yang berhak untuk melakukan pungutan pajak adalah negara, dengan alasan apapun swasta tidak boleh memungut pajak;
2. Berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan);
3. Pembayaran pajak tidak mempunyai kontraprestasi langsung secara individu, artinya kontraprestasi diberikan oleh negara kepada rakyat dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak;
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bersifat umum artinya bahwa pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum;
5. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian atau yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang, dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah;
6. Pemerintah dapat memungut pajak kalau sudah ada undang-undangnya dan aturan pelaksanaannya;
7. Pajak merupakan kewajiban masyarakat yang apabila diabaikan akan terkena sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.

Pajak disamping sebagai sumber penerimaan negara yang utama (budgetair) juga mempunyai fungsi lain seperti alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (regulair). Pajak sebagai alat anggaran juga dipergunakan sebagai alat mengumpulkan dana guna

membayai kegiatan-kegiatan pemerintah terutama kegiatan rutin (Suparmoko, 2000:96). Oleh sebab itu kedua fungsi pajak diatas harus dijalankan secara seimbang, karena apabila pengaturannya tidak secara seimbang sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian.

Pengenaan pajak dapat menimbulkan eksternalitas yang dapat merugikan kepentingan umum, sehingga perlu adanya pengaturan untuk menjamin kelangsungan sumber daya dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu maka keputusan untuk mengenakan pajak terhadap suatu obyek hendaknya dilakukan secara hati-hati dan bijaksana untuk menghindari terjadinya dis-insentif bagi perekonomian.

Menurut Meier (1995:197-198) ada 4 kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk memungut suatu jenis pajak di negara yang sedang berkembang :

1. Sebagai suatu sumber penerimaan potensial, maksudnya suatu jenis pajak harus dilihat sebagai suatu elastisitas pajak tersebut terhadap variabel-variabel makro ekonomi seperti PDRB, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk disamping inflasi;
2. Dampak terhadap alokasi sumber sumber ekonomi, untuk menggambarkan bahwa memadai atau tidaknya suatu perolehan pajak jika dikaitkan dengan bentuk dan besarnya dana yang diperlukan untuk memberikan layanan yang dibiayai sehingga beban suatu pajak dapat bermanfaat untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi secara lebih efisien;

3. Keadilan, yang dimaksud dengan keadilan adalah menyangkut distribusi beban pajak apakah tarif yang progresif atau menggunakan tarif tetap. Pembebanan pajak harus adil baik secara horizontal maupun vertikal;
4. Administrasinya rendah, kriteria ini berkaitan dengan administrasi yang meliputi sistem penetapan sumber daya manusia aparatur, biaya pemungutan serta sarana dan prasarana pemungutan.

### 2.1.3. Pajak Daerah

Menurut Davey (1998:40) secara umum perpajakan daerah dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi penetapan tarifnya oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan/atau dipungut oleh pemerintah daerah;
4. Pajak yang dipungut dan di-administrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagikan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya untuk menilai pajak daerah menurut Devas dkk (1989:61-62), dapat digunakan kriteria pengukuran sebagai berikut :

1. Hasil (*yield*) yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah

tidaknya memperkirakan besarnya hasil pajak tersebut; perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya;

2. Keadilan (*equity*) dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang ; pajak harus adil secara horizontal (artinya beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama); adil secara vertikal (artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh sekelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar), dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat (dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari suatu daerah ke daerah lain kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat);
3. Daya guna ekonomi (*economic efficiency*), pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dan pilihan produsen menjadi salah satu arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil beban lebih atas pajak;
4. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut keamanan politik dan keamanan tata usaha;

5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*stability as a local revenue sources*), ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah :

“iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah”

#### **2.1.4. Konsep Retribusi**

Menurut Munawir (1997), retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Lebih lanjut diuraikan pula definisi dan pengertian yang berkaitan dengan retribusi yaitu dikutip dari Sproule-Jones and White yang mengatakan bahwa retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan

keuntungan langsung dari layanan itu. Dengan kata lain retribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi dari pada biaya layanan.

Pada bagian lain Queen (1998:2) menerangkan bahwa :

“ Suatu tanggapan menekankan atau memperjelas kenyataan bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian dari program bukan sebagai pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa bagian yang mudah dalam menyusun retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif. Bagian tersulitnya adalah meyakinkan masyarakat (publik) tanpa tanpa diluar kesadaran mereka tarif tetap harus diberlakukan”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi menurut Haritz (1995;84) adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bersifat ekonomis;
2. Ada imbalan langsung kepada yang membayar;
3. Iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar;
4. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetair-nya tidak menonjol;
- 5 Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

#### **2.1.5. Retribusi Daerah**

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa beberapa atau sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penerimaan retribusi karena masih mendapat dana dari pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah perlu dikaji agar dapat diketahui seberapa besar potensi riil atau wajar, tingkat efektivitas dan efisiensinya. Peningkatan retribusi yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah.

Devas (1989:46) mengemukakan bahwa pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat. Dalam garis besarnya penerimaan daerah (termasuk pajak yang diserahkan) hanya menutup seperlima dari pengeluaran pemerintah daerah. Meskipun banyak pula negara lain dengan keadaan yang sama atau lebih buruk lagi. Memang pemerintah daerah tidak harus berdiri sendiri dari segi keuangan agar dapat memiliki tingkat otonomi yang berarti, yang penting adalah "wewenang di tepi" artinya memiliki penerimaan daerah sendiri yang cukup sehingga dapat mengadakan perubahan disana sini. Pada tingkat jasa layanan yang disediakan, untuk itu mungkin sudah memadai jika 20% dari pengeluaran berasal dari sumber-sumber penerimaan daerah.

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas atau karena memperoleh jasa layanan langsung atas usaha milik daerah untuk kepentingan umum atau karena diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Sementara itu didalam Undang-Undang No.34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 nomor 26 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Oleh karena itu retribusi merupakan pembayaran atas penggunaan barang

atau jasa yang disediakan untuk umum oleh pemerintah, maka penarikannya dilakukan umumnya di tempat pemakaian. Retribusi dapat juga ditagihkan kepada badan atau orang pribadi atas dasar pembayaran dengan penggunaan terbatas (dijatahkan) atau pembayaran dengan periode tertentu yang telah disepakati.

Hal tersebut diatas sejalan dengan uraian Queen (1998:12-18) tentang permasalahan dan kebijaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah dikatakan pula bahwa persaingan retribusi antara pemerintah daerah tidak akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tarif, yang penting adalah bila ada pemerintah daerah yang berdekatan mengadakan atau menyediakan barang atau jasa yang sama, maka saling tukar informasi menjadi penting untuk mengurangi kerugian.

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi ciri-ciri retribusi daerah menurut Kaho (1997:152) adalah sebagai berikut:

- Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah;
- Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkannya atau dengan jasa yang disiapkan daerah.

#### **2.1.6. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Undang-undang perpajakan yang mengatur secara menyeluruh tentang jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Dengan

terbitnya undang-undang perpajakan ini dapat dikatakan terjadi reformasi perpajakan yang mana jenis pajak yang tadinya banyak sekali macamnya ( pajak radio, pajak bangsa asing, dan lain-lain) menjadi hanya sekitar 6 pajak pokok saja.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Jenis Pajak Daerah pada Tingkat I adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan yang termasuk dalam jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari :

- a. Pajak Hotel dan Restoran
- b. Pajak Hiburan
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Obyek Retribusi terdiri dari :

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha;
- c. Perizinan Tertentu.

Retribusi dibagi atas tiga golongan yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah kemudian terbit Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **2.1.7. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil (Faried,1992:263). Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang jika terjadi pertumbuhan output riil. Output total riil suatu perekonomian bisa juga tetap konstan atau mengalami penurunan sepanjang waktu. Ini berarti perekonomian statis atau mengalami stagnasi. Perubahan ekonomi meliputi baik pertumbuhan, statis ataupun penurunan pendapatan nasional riil

Pertumbuhan ekonomi ini biasanya dinyatakan dalam prosentase, jadi misalnya perekonomian tumbuh sebesar 3 persen pertahun, ini berarti Produk Domestik Bruto naik sebesar 3 persen pertahun. Angka persentase ini sering disebut dengan laju pertumbuhan ekonomi. Keadaan atau posisi kesejahteraan ekonomi dalam jangka panjang dipengaruhi oleh besarnya PDB serta laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan mempengaruhi kegiatan perekonomian dan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat ini akan mempengaruhi daya beli dan kemampuan untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

### **2.1.8. Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Bruto merupakan suatu konsep penting dalam perekonomian. PDB menunjukkan nilai seluruh output atau produk dalam perekonomian suatu negara (Faried, 1992:13).

Informasi yang memberikan gambaran mengenai pembangunan bidang ekonomi di tingkat regional disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto. PDRB ini bisa diukur dengan harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah atau nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Prinsip perhitungan PDRB ini sama dengan perhitungan PDB ( Faried, 1992:41)

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Semakin tinggi pendapatan perkapita seseorang menunjukkan suatu indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan pula akan semakin tinggi kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Berarti semakin tinggi PDRB riil suatu daerah maka semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Sehingga dapat dikatakan bahwa PDRB riil mempunyai hubungan yang positif terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah

#### **2.1.9. Inflasi**

Cara lain untuk membiayai pembangunan adalah inflasi. Inflasi diartikan sebagai keadaan dimana harga umum meningkat secara terus-menerus. Dengan kenaikan harga umum itu berarti bahwa semua unit ekonomi (konsumen maupun produsen) akan membeli barang dengan jumlah yang lebih sedikit tetapi dengan pengeluaran rupiah yang sama. Dengan kata lain mereka mengurangi konsumsi riil dengan adanya inflasi itu (Irawan, 1992)

Mardiasmo dan Makhfatih (2000: II-10) mengemukakan pula bahwa inflasi merupakan faktor yang dapat meningkatkan penerimaan daerah jika pajak ditetapkan dengan menggunakan omzet penjualan. Inflasi akan mempunyai pengaruh terhadap masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap, dan secara keseluruhan akan berpengaruh pada kemampuan atau daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk membayar pajak atau retribusi daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan inflasi berhubungan positif dengan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

#### **2.1.10. Jumlah Penduduk**

Ada beberapa sumber strategis dan dominan yang menentukan pertumbuhan ekonomi, tergantung pada bagaimana kita mengklasifikasikannya. Salah satu jenis klasifikasinya adalah menjadi faktor-faktor fisik dan manajemen yang mempengaruhi penggunaan sumber-sumber tersebut (Faried, 1992:266). Faktor pertumbuhan berupa faktor-faktor fisik sumber-sumber daya alami,

kuantitas dan kualitas sumber-sumber daya manusia, jumlah barang –barang kapitan dan teknologi. Keempat faktor ini disebut pula faktor-faktor penawaran dalam pertumbuhan ekonomi. Tersedianya lebih banyak dan lebih baik sumber-sumber alami dan manusia, barang kapital, serta tingkat pengetahuan teknologi yang tinggi memungkinkan perekonomian memproduksi jumlah output lebih besar

Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Penduduk dianggap sebagai pemacu pembangunan. Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi. Konsumsi dari penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan ( Dumairy, 1996)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk yang bertambah merupakan sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah, karena pajak dan retribusi ini dipungut dari penduduk. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antara jumlah penduduk dan penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah positif.

#### **2.1.11. Perubahan Peraturan Perpajakan**

Berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi keleluasaan bagi Pemerintah daerah untuk menggali

potensi yang dapat meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini berarti berlakunya reformasi dibidang perpajakan ini mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

## 2.2. Penelitian/Studi Terdahulu

Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah atau belum diteliti oleh peneliti lain. Dengan penelusuran penelitian terdahulu ini akan dapat dipastikan sisi ruangan yang akan diteliti yang dapat diteliti dalam penelitian ini, dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulangan dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang berhasil dipilih untuk dikedepankan dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian/ Studi Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Obyek Penelitian	Kesimpulan
1	2	3	4
1.	Nicholas Waroy (1997)	Potensi Pajak dan Retribusi Daerah berkaitan dengan otonomisasi Daerah Tingkat II Sorong	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Sorong terhadap total penerimaan (APBD) sangat rendah yaitu rata-rata 4,59%. Apabila dikaitkan dengan tolok ukur otonomisasi penelitian Departemen Dalam Negeri dan Fisipol Universitas Gadjah Mada, maka klasifikasi kemampuan kabupaten ini untuk berotonomi sangat kurang karena termasuk dalam daerah tingkat II yang mempunyai rasio kontribusi terhadap total APBD-nya antara 0% - 10%.

Lanjutan Tabel 2.1

1	2	3	4
2.	Mille: dan Russek (1997)	Struktur fiskal dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat negara bagian dan daerah di Amerika Serikat. Dari hasil penelitian ditemukan	Di satu sisi pajak dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi bila hasilnya digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan di sisi lain dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi bila hasilnya digunakan untuk pembayaran transfer. Implikasinya adalah bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dapat mendorong penerimaan melalui pajak dan menggunakannya secara tepat untuk membiayai pengeluaran yang bersifat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
3.	Jaka Sriyana	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan PAD (Pajak dan Retribusi Daerah), dampak reformasi perpajakan terhadap Penerimaan Daerah dan Pembangunan Daerah, serta menganalisis strategi/kebijakan alternatif dalam upaya meningkatkan PAD	Dari hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa variable pendapatan perkapita (Yk) dan jumlah penduduk (Pd) merupakan variable yang cukup penting dalam menentukan PAD dan pajak, baik untuk tingkat I maupun tingkat II. Dengan demikian peningkatan pajak dan PAD masing-masing daerah di Indonesia, selain disebabkan adanya kebijakan reformasi perpajakan juga ditentukan oleh pendapatan perkapita masyarakat dan jumlah penduduk, terutama penduduk yang bekerja.
4.	Elita Bharantik (1999)	Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial untuk dikembangkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatannya di Kabupaten Jayapura.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Jayapura terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat adalah tinggi yaitu rata-rata 0,0648. Rasio rata-rata ini menunjukkan bahwa peran pendapatan asli daerah hanya sebesar 6,48% dan sebesar 93,52% merupakan ketergantungan daerah terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah tingkat I.

Lanjutan Tabel 2.1

1	2	3	4
5.	Mardiasmo dan Makhfatih (2000:8)	Potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada di daerah untuk menghasilkan penerimaan tertentu	Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel ekonomi (variabel yang tidak bisa dikendalikan), dan variabel non ekonomi (variabel yang bisa dikendalikan) seperti misalnya kebijakan dan kelembagaan. Variabel tersebut: adalah keadaan struktur ekonomi, jumlah penduduk dan PDRB Perkapita riil, tingkat inflasi, peningkatan cakupan penerimaan daerah, penyesuaian tariff, pengembangan baru, sumber pendapatan baru dan peraturan yang baru.
6.	Lobo Bulu (2002),	Hubungan antara jumlah penduduk dan PDRB terhadap PAD di Propinsi DKI Jakarta.	Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada hubungan yang positif atau searah antara jumlah penduduk dan PAD. Terjadi peningkatan PAD karena pertambahan jumlah penduduk. Selain itu Lobo Bulu juga menemukan adanya hubungan yang positif antara PDRB dan PAD. Semakin tinggi PDRB maka semakin tinggi PAD, karena semakin meningkatnya PDRB berarti meningkat pula kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan tersebut, jumlah dan jenis variabel yang digunakan bervariasi, ada yang dua variabel ada yang tiga variabel dan meliputi wilayah yang berbeda karakteristik dan potensinya. Dalam penelitian yang dilakukan di Kota Semarang, akan digunakan beberapa variabel yang dianggap cukup dominan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah.

### **2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis**

Kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama kemampuan suatu daerah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dua sumber utama penerimaan daerah di sebagian besar daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia adalah dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam rangka menuju kemandirian daerah, maka sebagai suatu sumber penerimaan potensial, pajak daerah dan retribusi daerah harus dilihat elastisitasnya terhadap pengaruh variabel-variabel makro ekonomi antara lain PDRB, jumlah penduduk, inflasi dan perubahan peraturan. Selanjutnya sebagai sumber penerimaan yang potensial pajak dan retribusi daerah perlu digali potensinya agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan, maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Variabel Tidak Bebas ( Dependent Variabel )

- Pajak dan Retribusi Daerah

Yaitu seluruh penerimaan jenis pajak dan retribusi daerah dalam satu tahun anggaran.

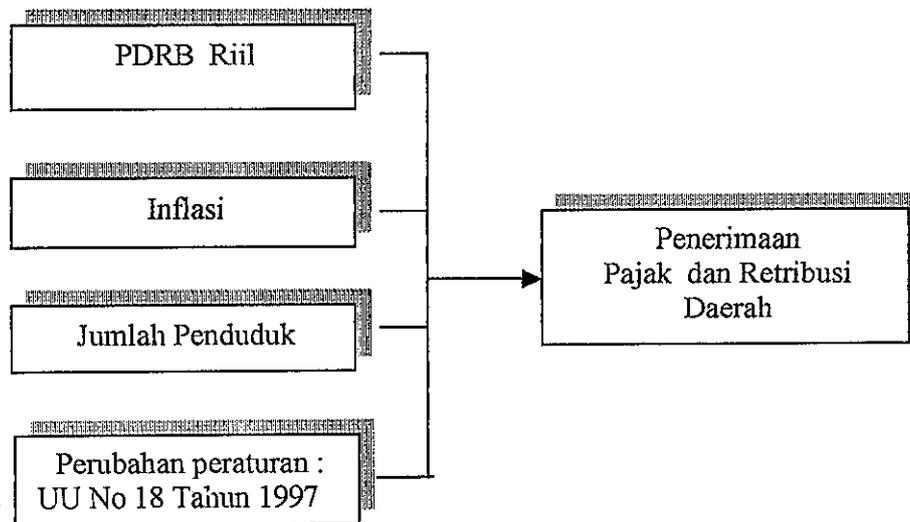
b. Variabel Bebas ( Independent Variabel)

- PDRB riil
- Inflasi
- Jumlah Penduduk
- Perubahan Peraturan di bidang Perpajakan yaitu Undang-undang No 18 tahun 1997

Penentuan-penentuan variabel bebas diatas didukung oleh teori-teori yang sudah dikemukakan sebelumnya, dan variabel-variabel tersebut merupakan variabel-variabel yang cukup dominan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah, disamping keterbatasan biaya dan waktu penelitian.

Dengan melihat variabel-variabel tersebut, maka secara skematis uraian tersebut dapat diringkas sebagai berikut :

**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



#### **2.4. Hipotesis**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, disusun hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang positif antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah.
2. Terdapat pengaruh yang positif antara inflasi terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah.
3. Terdapat pengaruh yang positif antara jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah.
4. Terdapat pengaruh yang positif antara diberlakukannya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah

5. Secara serentak (over all ) terdapat pengaruh yang positif antara jumlah penduduk, PDRB, inflasi dan reformasi perpajakan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi dan waktu Penelitian**

Penelitian terhadap topik ini dibatasi hanya di Kota Semarang dengan suatu pertimbangan bahwa kota ini merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya. Secara keseluruhan sektor-sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi.

Data yang digunakan adalah data *time series* berupa data tahunan selama 20 (dua puluh) tahun terakhir tepatnya sejak tahun anggaran 1983/1984 sampai dengan tahun 2002.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini memakai data sekunder, berupa data tahunan didasarkan pada data runtun waktu yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang bersumber dari berbagai publikasi yang diterbitkan oleh instansi terkait terutama Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta penerbitan non pemerintah dalam dan luar negeri.

#### **3.3. Model dan Alat Analisis**

##### **3.3.1. Model Analisis Regresi Berganda**

Model analisis yang digunakan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah regresi berganda yang ditaksir dengan metode Ordinary Least Square

regresi berganda yang ditaksir dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Penggunaan regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, maka hubungan antar variabel dalam penelitian ini menggunakan model yang mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Shah dan Qureshi (Mudrajad K,1987) sebagai berikut :

$$PD = f(PDRB, JP, Inf, D) \dots \dots \dots (1)$$

$$RD = f(PDRB, JP, Inf, D) \dots \dots \dots (2)$$

Model ekonometri yang digunakan dalam analisis ini adalah :

$$PD = \alpha_0 + \beta_1 PDRB + \beta_2 JP + \beta_3 Inf + \beta_4 D + \mu \dots \dots \dots (3)$$

$$RD = \alpha_0 + \beta_1 PDRB + \beta_2 JP + \beta_3 Inf + \beta_4 D + \mu \dots \dots \dots (4)$$

Dimana :

PD = Pajak Daerah, dalam rupiah

RD = Retribusi Daerah, dalam rupiah

PDRB= PDRB riil , dalam rupiah

JP = Jumlah penduduk , dalam jiwa

Inf = Inflasi, dalam persen

D = Variabel Dummy ( UU Nomor 18 tahun 1997), dimana

Sebelum berlakunya UU No 18 tahun 1997 = 0

Sesudah berlakunya UU No. 18 Tahun 1997= 1

$\alpha_0$  = Konstanta (intersep)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Parameter yang diestimasi

$\mu$  = error (koefisien faktor gangguan)

Selanjutnya untuk bisa diolah dalam persamaan linier dengan metode OLS (Ordinary Least Square), maka model penelitian tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma, sehingga bentuk model penelitian menjadi :

$$\text{Log PD} = \alpha_0 + \beta_1 \log \text{PDRB} + \beta_2 \log \text{JP} + \beta_3 \log \text{Inf} + \beta_4 \text{D1} + \mu \dots\dots (5)$$

$$\text{Log RD} = \alpha_0 + \beta_1 \log \text{PDRB} + \beta_2 \log \text{JP} + \beta_3 \log \text{Inf} + \beta_4 \text{D1} + \mu \dots\dots (6)$$

### 3.3.2. Alat Analisis Data

Alat analisis data merupakan kegiatan pengolahan dari data yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan sesuai dengan kebutuhan. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis yaitu metode Deskriptif Analitis dan Kuantitatif Analitis.

#### 3.3.2.1. Uji Asumsi Klasik

Sebagai langkah awal untuk mengetahui apakah data yang diestimasi dengan model regresi tersebut hasilnya layak digunakan sebagai model, digunakan uji asumsi klasik sebagai berikut : (Gujarati, 1999)

- (1) Uji Multikolinearitas, untuk menguji apakah pada model regresi terdapat hubungan linear baik yang pasti atau mendekati pasti diantara variabel menjelaskan. Ada tidaknya multikolinearitas ini dapat ditunjukkan dari nilai  $R^2$  yang tinggi, tetapi tingkat signifikan variabel

bebas berdasar atas uji t-statistik sangat kecil bahkan tidak ada yang signifikan ( Gujarati, 1999 :322)

## **(2) Uji Asumsi Normalitas**

Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk melihat apakah didalam sebuah model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Data terdistribusi secara normal dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik.

Dasar pengambilan keputusan :

- a). Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b). Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

## **(3) Uji Autokorelasi**

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode lain, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Model regresi yang baik adalah apabila kesalahan gangguan pada periode yang berbeda tidak mempunyai korelasi.

#### (4) Uji Heteroskedastisitas

Kasus heteroskedastisitas terjadi apabila variable gangguan tidak mempunyai varians yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas adalah penaksir OLS (*ordinary least square*) tetap tidak bias tetapi tidak efisien. Apabila variabel gangguan mempunyai varians yang sama atau mendekati sama untuk semua observasi, disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang mengandung homoskedastisitas.

Dari hasil regresi yang diperoleh, kemudian dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah koefisien regresi yang diperoleh mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak, baik secara simultan maupun secara parsial dan seberapa besar pengaruhnya. Adapun tahap pengujiannya yaitu :

- a. Uji t statistik, untuk menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara parsial dengan mengasumsikan bahwa variabel lain dianggap konstan. Adapun tahap pengujiannya adalah sebagai berikut :

- Menentukan formula *null hipotesis* statistik yang akan diuji

$H_0 : \beta_i = 0$ , artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) terhadap variabel tergantung (Y) secara parsial

- Menentukan nilai  $t = \frac{\beta}{Se(\beta_i)}$

Dimana  $\beta$  = koefisien regresi

$Se(\beta_i) = \text{standart estimasi } \beta_i$

- Dengan tingkat keyakinan atau  $\alpha = 5\%$  dan degree of freedom,  $df = n - k$  akan diperoleh t tabel, kemudian membandingkan dengan nilai t-hitung yang diperoleh untuk menentukan apakah ada pengaruhnya signifikan atau tidak.

- Bila t hitung  $>$  t-tabel, maka  $H_0$  dinyatakan ditolak dan menerima  $H_1$
- Bila t hitung  $<$  t- tabel, maka  $H_0$  dinyatakan diterima dan menolak  $H_1$

b. Uji F statistik, untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel tergantung (Y). Adapun tahap pengujiannya adalah sebagai berikut :

- Menentukan formula *null hipotesis* statistik yang akan diuji  $H_0$  :  
 $\beta_1 = \beta_2 = \dots = 0$ , artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3$ ) terhadap variabel tergantung (Y) secara simultan
- Menentukan nilai F hitung = 
$$\frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(N-k)}$$
- Dengan tingkat keyakinan atau  $\alpha = 5\%$  dan degree of freedom,  $df = n - k - 1$  akan diperoleh F tabel, kemudian membandingkan dengan nilai F-hitung yang diperoleh untuk menentukan apakah ada pengaruhnya signifikan atau tidak.

- Bila  $F$  hitung  $>$   $F$ -tabel, maka  $H_0$  dinyatakan ditolak dan menerima  $H_1$
- Bila  $F$  hitung  $<$   $F$  - tabel, maka  $H_0$  dinyatakan diterima dan menolak  $H_1$

### **3.3.2.2. Analisis Klasifikasi Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Overlay)**

Analisis overlay dimaksudkan untuk melihat deskripsi kegiatan jenis pajak dan retribusi daerah yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi.

Terdapat 4 (empat) kemungkinan dalam analisis overlay :

- a. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi.
- b. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil. Kegiatan ini dapat ditingkatkan kontribusinya untuk dipacu menjadi kegiatan yang dominan.
- c. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar, kegiatan ini sangat mungkin merupakan kegiatan yang sedang mengalami penurunan.

- d. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun kriteria kontribusi.

Untuk mengetahui jenis pajak dan retribusi daerah diperlukan identifikasi atau klasifikasi kondisi yang didasarkan pada jumlah serta perkembangan setiap jenis pendapatan asli daerah. Identifikasi ini dilakukan dengan cara mematrik antara komposisi penerimaan dan pertumbuhan penerimaan, maksudnya adalah :

- a. Komposisi penerimaan, yaitu total hasil setiap jenis pajak atau retribusi daerah terhadap rata-rata hasil penerimaan seluruhnya.
- b. Pertumbuhan penerimaan, yaitu kenaikan hasil (perubahan penerimaan) setiap jenis penerimaan pajak atau retribusi daerah terhadap kenaikan atau pertumbuhan penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah.

Secara tabel matrik, komposisi penerimaan dan pertumbuhan penerimaan jenis pajak dan retribusi daerah dapat dilihat Tabel 3.1. berikut (W.K. Jaya,1996:29-30)

**Tabel 3.1.**  
**Komposisi Kontribusi dan Pertumbuhan Dalam Analisis Overlay**

Kontribusi	$\frac{X_i}{X} \geq 1$ (tinggi)	$\frac{X_i}{X} < 1$ (rendah)
Pertumbuhan		
$\frac{DX_i}{DX} \geq 1$ (tinggi)	Prima	Berkembang
$\frac{DX_i}{DX} < 1$ (rendah)	Potensial	Terbelakang.

Sumber : W.K. Jaya," Analisis Keuangan Daerah: Pendekatan Makro", Yogyakarta,1996

Keterangan :

$DX_i$  : pertumbuhan setiap jenis pajak atau retribusi daerah

$DX$  : pertumbuhan seluruh penerimaan jenis pajak atau retribusi daerah

$X_i$  : total setiap jenis pajak atau retribusi daerah

$X$  : rata-rata seluruh penerimaan pajak atau retribusi daerah.

Berdasarkan analisis overlay dan klasifikasi pajak dan retribusi daerah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kondisi :

- a. Prima, apabila pajak atau retribusi daerah memberikan kontribusi dan pertumbuhan sama dengan atau lebih tinggi dari 1%;

- b. Potensial, apabila pajak atau retribusi daerah memberikan kontribusi  $\geq 1\%$  sedangkan pertumbuhan kurang dari 1%;
- c. Berkembang, apabila pajak atau retribusi daerah memberikan kontribusi kurang dari 1%, sedangkan pertumbuhan sama dengan atau lebih dari 1%;
- d. Terbelakang, apabila pajak atau retribusi daerah memberikan kontribusi dan pertumbuhan kurang dari 1%.

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak atau retribusi daerah digunakan rumus (HG. Suseno, 1990: 36):

$$\Delta X_i = \frac{X_{it} - X_{i(t-1)}}{X_{i(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana :

$\Delta X_i$  : rasio pertumbuhan jenis pajak atau retribusi daerah

$X_{it}$  : jumlah pajak atau retribusi daerah tahun ke-t

$X_{i(t-1)}$  : jumlah pajak atau retribusi daerah tahun ke t-1.

Untuk mengetahui kontribusi masing-masing jenis pajak atau retribusi daerah digunakan rumus (HG. Suseno, 1990 : 21) :

$$\Delta X_i = \frac{X_i}{X} \times 100\%$$

Dimana :

$\Delta X_i$  : rasio kontribusi jenis pajak atau retribusi daerah

$X_i$  : jumlah jenis pajak atau retribusi daerah

$X$  : jumlah pajak atau retribusi daerah.

### 3.3.2.3. Analisis Proyeksi

Untuk mengetahui tentang proyeksi pajak dan retribusi daerah dimasa yang akan datang digunakan rumus sebagai berikut.

- a. Persamaan trend linear apabila grafik yang dihasilkan berbentuk garis lurus ( J. Supranto, 217).

$$Y' = a + b X$$

Dimana  $a$  = bilangan konstan

$b$  = rata-rata kenaikan  $Y$  persatuan waktu (tahun)

$Y'$  = data berkala (dalam hal ini penerimaan pajak dan retribusi proyeksi)

$X$  = waktu (tahun)

- b. Persamaan trend tidak linear yaitu ( J Supranto, 194 ):

$$Y' = ab^x$$

Persamaan ini dapat diubah menjadi trend semi log yaitu

$$\text{Log } Y' = \text{Log } a + (\text{log } b) X$$

$$\text{Log } Y' = Y'_0; \text{ log } a = a_0 \text{ dan } \text{log } b = b_0$$

$Y'$  : besarnya penerimaan pajak atau retribusi daerah.

$a$  : adalah komponen yang tetap ( konstanta)

$b$  : adalah besarnya slope atau kemiringan yang dihitung dari data historis.

x : tahun

### 3.4. Definisi Operasional Variabel

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah realisasi penerimaan asli daerah yang berasal dari : pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lain-lain yang sah, yang dinyatakan dalam rupiah.
- b. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah di kota Semarang selama satu tahun anggaran, yang dinyatakan dalam rupiah.
- c. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan di kota Semarang selama satu tahun anggaran, yang dinyatakan dalam rupiah.
- d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil adalah pendapatan rata-rata dari semua kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua produsen di kota Semarang dari berbagai sektor ekonomi selama satu tahun (dengan menggunakan harga konstan 1993) dinyatakan dalam rupiah.

- e. Inflasi adalah sebuah hasil perhitungan yang dilakukan BPS untuk melihat kenaikan harga dihitung /inflasi yang dibatasi diwilayah kota Semarang, dalam kurun waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam persen
- f. Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk yang ada dalam Wilayah Kota Semarang dalam kurun waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan jiwa.
- g. Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kemampuan atau kekuatan yang ada pada pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut, yang dihitung dengan melihat kontribusi dan pertumbuhan .
- h. Perubahan peraturan adalah perubahan peraturan yang berlaku dalam dalam kurun waktu antara tahun 1983 sampai dengan 2002, yang dalam hal ini diambil dari UU yang sangat berpengaruh di bidang perpajakan (reformasi perpajakan) yaitu Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG**

#### **4.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah**

Kota Semarang mempunyai terletak pada  $6^{\circ} 50' \text{ LS} - 7^{\circ} 10' \text{ LS}$  dan  $109^{\circ} 50' \text{ BT} - 110^{\circ} 35' \text{ BT}$ . Secara administratif Kota Semarang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
- Sebelah Timur : Kabupaten Demak

Kota Semarang memiliki 16 Kecamatan, yaitu Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat, Tugu, Ngaliyan.

#### **4.2. Luas Wilayah**

Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar  $373,67 \text{ km}^2$  terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Mijen ( $57,55 \text{ km}^2$ ) diikuti oleh kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar  $52,63 \text{ km}^2$ , sedangkan kecamatan yang terkecil adalah kecamatan Semarang Tengah ( $5,14 \text{ km}^2$ ). Luas wilayah Kota Semarang ini terdiri dari 3.455,71

ha tanah sawah dan 33.914,69 ha tanah kering. Secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 4.1

**Tabel 4.1.**  
**Luas Kecamatan dan Persentase Luas Tanah**  
**Terhadap Luas Kota Semarang ( Ha) Tahun 2001**

	Kecamatan	Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah	Persentase Terhadap Luas Kota
1	Mijen	1008.89	5206.36	6215.25	16.63
2	Gunungpati	1404.43	3994.66	5399.09	14.45
3	Banyumanik	99	2414.06	2513.06	6.72
4	Gajah Mungkur	0	764.98	764.98	2.05
5	Semarang Selatan	0	848.05	848.05	2.27
6	Candisari	0	555.51	555.51	1.49
7	Tembalang	171	4249	4420	11.83
8	Pedurungan	71.32	2000.69	2072.01	5.54
9	Genuk	92.5	2645.94	2738.44	7.33
10	Gayamsari	0	549.47	549.47	1.47
11	Semarang Timur	0	770.25	770.25	2.06
12	Semarang Utara	0	1133.28	1133.28	3.03
13	Semarang Tengah	0	604.99	604.99	1.62
14	Semarang Barat	18.57	2368.14	2386.71	6.39
15	Tugu	460	2669.35	3129.35	8.37
16	Ngaliyan	130	3139.98	3269.98	8.75
	<b>Jumlah</b>	<b>3455.71</b>	<b>33914.71</b>	<b>37370.39</b>	

Sumber : Kota Semarang Dalam Angka 2001

### 4.3. Jumlah Penduduk

Dilihat dari kepadatan penduduknya, kecamatan Mijen dan kecamatan Tugu mempunyai jumlah penduduk terkecil, yaitu di bawah 1000 orang tiap km<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan karena kedua kecamatan diatas dikembangkan sebagai daerah pertanian dan kawasan industri. Untuk daerah pusat kota, kecamatan yang terpadat penduduknya adalah kecamatan Semarang Tengah dengan 15.021 orang tiap km<sup>2</sup>. Berdasarkan hasil registasi penduduk tahun 2001, jumlah penduduk kota Semarang

tercatat sebesar 1.322.320 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2001 sebesar 0,97 %.

Penduduk kota Semarang yang berjumlah 1.322. 320 jiwa pada tahun 2001 merupakan potensi yang cukup besar jika dikaitkan dengan penerimaan daerah, karena pajak dan retribusi daerah dipungut dari masyarakat atau penduduk. Secara keseluruhan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di kota Semarang dapat dilihat dalam Tabel 4.2

**Tabel 4.2.**  
**Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang Tahun 1990 -2001**

Tahun	Jumlah Penduduk		Total	Pertumbuhan (%)
	Laki-laki	Perempuan		
1990	556.565	569.700	1,126,265	
1991	567.629	579.302	1,146,931	1.83%
1992	578.918	592.660	1,171,578	2.15%
1993	582.772	594.790	1,177,562	0.51%
1994	598.102	620.658	1,218,760	3.50%
1995	612.273	620.658	1,232,931	1.16%
1996	622.014	629.831	1,251,845	1.53%
1997	626.450	635.479	1,261,929	0.81%
1998	632.654	640.896	1,273,550	0.92%
1999	641.493	648.666	1,290,159	1.30%
2000	651.315	658.352	1,309,667	1.51%
2001	657.274	665.046	1,322,320	0.97%
			Rata-rata	1.47%

Sumber : Semarang Dalam Angka 1998- 2001, BPS Kantor Perwakilan Jawa Tengah

#### 4.4. Mata Pencaharian Penduduk

Dilihat dari mata pencaharian penduduk Kota Semarang sebanyak 22,78 % adalah bekerja sebagai buruh industri, 10,74 % bekerja sebagai PNS dan ABRI, 28,55 % bekerja disektor lain-lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut .:

**Tabel 4.3**  
**Prosentase Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Kota Semarang Tahun 2001**

	Kecamatan	Mata Pencaharian					
		Petani Sendiri	Buruh Tani	Nelayan	Pengusaha	Buruh Industri	
1	Mijen	23.88%	37.89%	0.00%	1.77%	15.90%	6.14%
2	Gunungpati	5.19%	10.76%	0.00%	0.65%	52.60%	16.29%
3	Banyumanik	2.09%	3.26%	0.00%	1.76%	17.96%	10.34%
4	Gajah Mungkur	0.00%	0.00%	0.00%	0.64%	18.19%	8.51%
5	Semarang Selatan	0.00%	0.01%	0.00%	1.41%	16.79%	16.96%
6	Candisari	0.00%	0.00%	0.00%	0.88%	19.22%	22.37%
7	Tembalang	5.96%	0.94%	0.00%	0.28%	20.21%	24.76%
8	Pedurungan	2.94%	3.46%	0.00%	4.64%	31.07%	24.67%
9	Gonuk	9.39%	8.29%	0.01%	0.40%	34.68%	11.08%
10	Gayamsari	0.03%	0.01%	0.16%	2.65%	29.05%	21.39%
11	Semarang Timur	0.00%	0.00%	0.00%	3.06%	16.54%	6.40%
12	Semarang Utara	0.00%	0.00%	2.16%	0.74%	38.27%	12.64%
13	Semarang Tengah	0.00%	0.00%	0.00%	4.19%	11.87%	5.50%
14	Semarang Barat	0.03%	0.17%	0.09%	0.99%	13.25%	4.46%
15	Tugu	5.22%	14.64%	1.68%	0.81%	21.66%	11.39%
16	Ngaliyan	7.61%	4.19%	0.00%	8.96%	18.09%	6.38%
	<b>Jumlah</b>	<b>2.82%</b>	<b>2.93%</b>	<b>0.24%</b>	<b>2.21%</b>	<b>22.78%</b>	<b>13.14%</b>
No	Kecamatan	Mata Pencaharian					Jumlah
		Pedagang	Angkutan	PNS&ABRI	Pensiunan	Lain-lain	
1	Mijen	4.24%	2.58%	4.66%	2.94%	0.00%	100.00%
2	Gunungpati	3.56%	1.37%	3.73%	0.70%	5.16%	100.00%
3	Banyumanik	3.55%	4.21%	16.24%	8.98%	31.59%	100.00%
4	Gajah Mungkur	7.08%	4.52%	28.89%	12.85%	19.31%	100.00%
5	Semarang Selatan	12.53%	6.06%	15.67%	7.17%	23.40%	100.00%
6	Candisari	15.90%	3.52%	11.71%	7.84%	18.55%	100.00%
7	Tembalang	7.24%	1.83%	11.25%	5.50%	22.03%	100.00%
8	Pedurungan	6.93%	6.06%	16.81%	3.43%	0.00%	100.00%
9	Gonuk	5.36%	1.95%	3.60%	1.16%	24.06%	100.00%
10	Gayamsari	5.58%	1.11%	6.70%	2.68%	30.62%	100.00%
11	Semarang Timur	20.70%	6.26%	3.89%	1.60%	41.55%	100.00%
12	Semarang Utara	9.23%	2.32%	5.19%	2.77%	26.67%	100.00%
13	Semarang Tengah	17.06%	3.16%	7.07%	3.74%	47.42%	100.00%
14	Semarang Barat	5.00%	3.11%	10.16%	3.99%	58.76%	100.00%
15	Tugu	6.83%	0.86%	3.41%	0.91%	32.59%	100.00%
16	Ngaliyan	4.09%	2.25%	14.05%	2.07%	32.30%	100.00%
	<b>Jumlah</b>	<b>8.64%</b>	<b>3.46%</b>	<b>10.74%</b>	<b>4.50%</b>	<b>28.55%</b>	<b>100.00%</b>

Sumber : Kota Semarang Dalam Angka 2001, diolah

#### 4.5. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Kota Semarang pada tahun 1995 - 2000 berbasis pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Proporsi sektor ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sektor kedua yang berperan dalam perekonomian kota Semarang adalah sektor industri pengolahan, dan sektor ketiga yang besar kontribusinya adalah sektor jasa-jasa. Secara keseluruhan dapat dilihat dalam Tabel 4.4.

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Prosentase**  
**PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Konstan 1993**

SEKTOR	TAHUN					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Pertanian	1.65%	1.47%	1.23%	1.22%	1.16%	0.79%
2. Pertambangan dan Penggalian	0.22%	0.23%	0.21%	0.25%	0.25%	0.25%
3. Industri Pengolahan	29.31%	30.50%	30.60%	32.36%	31.96%	31.39%
4. Listrik, gas, & air bersih	1.33%	1.28%	1.28%	1.46%	1.47%	1.45%
5. Konstruksi	7.30%	7.16%	7.48%	3.21%	3.51%	3.57%
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	<b>32.37%</b>	<b>32.75%</b>	<b>33.52%</b>	<b>34.93%</b>	<b>35.00%</b>	<b>35.73%</b>
7. Pengangkutan dan komunikasi	6.41%	6.34%	6.23%	6.86%	6.75%	7.09%
8. Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan	8.42%	8.17%	8.02%	7.39%	6.47%	6.62%
9. Jasa-jasa	12.98%	12.07%	11.40%	12.28%	13.40%	13.05%
<b>JUMLAH</b>	100 %	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : PDRB Kota Semarang 1995 - 2000

Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang selama kurun waktu 1995 - 2000 mengalami penurunan pada saat terjadi krisis ekonomi. Pada tahun 1998 terjadi penurunan laju pertumbuhan PDRB riil yang cukup besar yaitu mencapai -22,27 %. Secara lebih jelas laju pertumbuhan PDRB Kota Semarang atas dasar harga konstan dapat dilihat dalam Tabel 4.5.

**Tabel 4.5**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Konstan 1993**

SEKTOR	1996	1997	1998	1999	2000
1. Pertanian	0.37%	-8.74%	-23.14%	-1.94%	-39.14%
2. Pertambangan dan Penggalian	12.28%	2.83%	-5.87%	5.76%	4.71%
3. Industri Pengolahan	14.83%	9.16%	-15.63%	2.09%	3.01%
4. Listrik, gas, & air bersih	7.51%	9.05%	-7.07%	3.78%	3.74%
5. Konstruksi	9.70%	12.70%	-184.80%	11.43%	6.44%
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	12.38%	10.97%	-17.35%	3.49%	6.67%
7. Pengangkutan dan komunikasi	10.43%	7.24%	-11.10%	1.66%	9.39%
8. Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan	8.59%	7.12%	-32.66%	-10.45%	6.96%
9. Jasa-jasa	4.61%	3.50%	-13.43%	11.32%	2.22%
<b>JUMLAH</b>	<b>11.36%</b>	<b>8.87%</b>	<b>-22.27%</b>	<b>3.29%</b>	<b>4.73%</b>

Sumber : PDRB Kota Semarang 1995 – 2000

Kondisi kota Semarang yang berbasis pada perdagangan dan jumlah penduduk yang cukup besar, maka sebenarnya kemampuan pemerintah Kota Semarang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang potensial bagi Kota Semarang untuk menuju kemandirian daerah di era otonomi.

#### **4.5. Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah**

Target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Semarang dapat dilihat dalam Tabel 4.6 :

**Tabel 4.6**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Semarang**  
**Tahun Anggaran 1996/1997 s/d 2000/2001**  
**(dalam rupiah)**

No.	Tahun Anggaran	Pajak Daerah	
		Target	Realisasi
1.	1996/1997	304.400.000	359.505.157
2.	1997/1998	239.125.000	713.007.090
3.	1998/1999	783.000.000	737.642.014
4.	1999/2000	1.987.000.000	2.323.889.067
5.	2000/2001	2.680.000.000	2.913.374.624

Sumber : Kantor DIPENDA Kota Semarang, Laporan Realisasi PAD beberapa terbitan (data diolah).

Berdasarkan Tabel 4.6. dapat diketahui bahwa penentuan target penerimaan pajak daerah di Kota Semarang dengan menggunakan pedoman pada target / realisasi pencapaian tahun anggaran sebelumnya, hal ini terlihat menonjol sekali pada tahun anggaran 1997/1998 dimana target diturunkan berdasarkan perkiraan terjadinya krisis ekonomi padahal realisasi yang diterima cukup besar. Perkiraan target tersebut kurang memperhatikan potensi sebenarnya yang ada pada masyarakat.

Selain itu juga terlihat bahwa pada setiap tahun anggaran, antara realisasi dan target terjadi selisih perkiraan yang berbeda dimana kadang realisasi melampaui target dan kadang sebaliknya. Selisih terbesar terjadi pada tahun anggaran 1997/1998 yaitu sebesar 298%.

Target dan realisasi retribusi daerah kota Semarang tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2000/2001 dapat dilihat dalam Tabel 4.7.

**Tabel 4.7**  
**Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Semarang**  
**Tahun Anggaran 1996/1997 s/d 2000/2001**  
**(dalam rupiah)**

No.	Tahun Anggaran	Retribusi Daerah	
		Target	Realisasi
1.	1996/1997	352.100.000	215.574.370
2.	1997/1998	407.757.000	185.339.024
3.	1998/1999	217.000.000	446.271.038
4.	1999/2000	499.000.000	667.985.219
5.	2000/2001	1.571.100.000	1.763.928.494

Sumber : Kantor DIPENDA Kota Semarang, Laporan Realisasi PAD beberapa terbitan (data diolah).

Dari Tabel 4.7 tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam penentuan target retribusi daerah masih berupa perkiraan saja dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada saat realisasi penerimaan tahun anggaran 1997/1998, Pemerintah Kota Semarang menurunkan target penerimaannya pada tahun anggaran 1998/1999. Penurunan target ini menyebabkan terjadi selisih yang cukup besar yaitu 48,6% antara realisasi penerimaan dan target pada tahun anggaran 1998/1999. Selisih yang cukup besar ini terkait dengan krisis ekonomi dan laju inflasi yang terjadi pada tahun 1997. Krisis yang berimbas pada keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan ini membawa dampak yang cukup berarti bagi Kota Semarang.

Di bawah ini ditampilkan penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 1998/1999 - 2002

Tabel 4.8.  
Penerimaan Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun 1998/99- 2002

No	JENIS PENERIMAAN	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002
	<b>a. Retribusi Jasa Umum</b>					
1	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	14,360,230.00	14,360,230.00	11,519,380.00	35,267,500.00	44,762,500.00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2,439,839,510.00	2,439,839,510.00	2,337,345,130.00	6,076,514,148.00	8,110,646,185.00
3	Retribusi Pasar	3,073,872,130.00	3,073,872,130.00	2,591,229,100.00	3,393,106,260.00	3,875,633,201.00
4	Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	456,785,090.00	456,785,090.00	328,784,650.00	388,929,175.00	307,286,000.00
5	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	2,719,596,520.00	2,719,596,520.00	2,767,475,650.00	5,581,045,625.00	5,536,180,895.00
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP & Catatan Sipil	1,005,596,400.00	1,005,596,400.00	794,532,500.00	2,886,462,500.00	3,268,501,000.00
8	Retribusi Perijinan Kendaraan Bermotor				1,359,020,000.00	2,238,343,000.00
9	Retribusi Air Bersih					
10	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	13,889,000.00	13,889,000.00	11,337,000.00	18,924,500.00	18,558,000.00
11	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	653,014,640.00	653,014,640.00	1,067,774,370.00	1,757,332,470.00	2,047,968,800.00
	<b>b. Retribusi Jasa Usaha</b>					
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	944,642,510.00	944,642,510.00	824,982,790.00	1,628,127,955.00	-
2	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan					
3	Retribusi Terminal	918,911,650.00	918,911,650.00	665,388,720.00	411,813,350.00	666,322,900.00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	664,738,790.00	664,738,790.00	507,093,270.00	579,159,069.00	195,341,634.00
5	Retribusi Tempat Pentipan Anak					
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah					

Tabel 4.8. Lanjutan

7	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Vila	-	-	-	-	190,115,268.00	230,705,620.00
8	Retribusi Penyedotan Kaku	24,700,000.00	24,700,000.00	24,695,500.00	24,695,500.00	68,305,000.00	70,164,000.00
9	Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	-	-	-	-
10	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal	-	-	-	-	-	-
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	493,495,550.00	493,495,550.00	417,038,550.00	417,038,550.00	615,089,750.00	514,464,700.00
12	Retribusi Penyeberangan Di Atas Air	-	-	-	-	-	-
13	Retribusi Pengolahan Limbah Air	-	-	-	-	-	-
<b>c. Retribusi Perijinan Tertentu</b>							
1	Retribusi Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah	-	-	-	-	-	-
2	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1,412,095,120.00	1,412,095,120.00	1,802,960,020.00	1,802,960,020.00	1,947,732,340.00	4,913,702,673.00
3	Retribusi Izin Trayek	48,021,000.00	48,021,000.00	34,751,880.00	34,751,880.00	69,939,375.00	80,734,375.00
4	Retribusi Izin Gangguan	617,537,600.00	617,537,600.00	784,269,890.00	784,269,890.00	1,381,030,625.00	2,389,410,760.00
5	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-	-	-	-	-	-
6	Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>15,501,095,740.00</b>	<b>15,501,095,740.00</b>	<b>14,971,176,600.00</b>	<b>14,971,176,600.00</b>	<b>28,387,914,910.00</b>	<b>34,579,767,143.00</b>

Sumber Data : Semarang Dalam Angka 2000- 2002, DPKD Kota Semarang

Tabel 4.9  
 Realisasi Penerimaan Dari Pajak Daerah  
 Kota Semarang Periode 1998/1999 – 2002

No	JENIS PENERIMAAN	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002
1	Pajak Reklame	1.810.945.900,00	1.810.946.000,00	1.366.478.297,00	2.517.341.497,00	3.867.505.368,00
2	Pajak Penerangan Jalan	14.949.880.020,00	14.810.946.000,00	14.305.285.131,00	24.305.299.845,00	35.645.446.807,00
3	Pajak Hotel dan Restoran	12.180.309.450,00	12.180.309.000,00	11.367.134.717,00	18.378.722.492,00	
4	Pajak Hiburan *	2.023.700.550,00	2.023.701.000,00	1.638.296.190,00	2.230.346.165,00	3.015.179.493,00
5	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Gol C	2.491.140,00	2.491.000,00	2.763.156,00	30.096.348,00	74.003.700,00
6	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	950.655.000,00	1.073.540.000,00	1.258.317.385,00	1.617.571.886,00	
7	Pajak Hotel					12.256.631.080,00
8	Pajak Restoran					10.412.975.016,00
9	Pajak Parkir					1.228.140.314,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>32.040.867.240,00</b>	<b>31.901.933.000,00</b>	<b>29.938.274.876,00</b>	<b>49.079.378.233,00</b>	<b>66.499.881.778,00</b>

Sumber, Semarang Dalam Angka 2000, DPKD Kota Semarang

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Analisis Regresi

Untuk mengetahui apakah pajak dan redistribusi yang diterima selama ini memang dipengaruhi oleh variabel-variabel PDRB riil, jumlah penduduk, inflasi, dan perubahan peraturan (UU No.18/1997), dilakukan analisis regresi. Dalam penelitian ini digunakan model analisis regresi linier berganda dengan metode Ordinal Least Square (OLS) dengan menggunakan program SPSS 10.0 for Windows.

Sebagai langkah awal selalu dilakukan penelitian terhadap adanya penyimpangan asumsi klasik. Langkah ini untuk mengetahui apakah data yang diestimasi dengan regresi tersebut hasilnya layak digunakan sebagai model

##### 5.1.1. Penerimaan Pajak Daerah

###### 5.1.1.1. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk memperoleh model *estimator linier* tidak bias yang terbaik, maka dilakukan uji asumsi klasik, yang meliputi heterokedastisitas, uji normalitas dan uji linieritas data.

###### 1. Uji Multikolinearitas

Hasil regresi yang diperoleh melalui SPSS for windows diuji apakah memiliki sifat efisien, efektif dan tidak bias melalui pengujian non-multikolinieritas pada model persamaan regresi berganda tersebut, dengan menganalisis melalui nilai *variance inflating factor* (VIF) dan nilai

*tolerance*. Batas VIF adalah 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1. Hasil yang diperoleh dengan bantuan SPSS tampak bahwa nilai VIF untuk masing-masing variabel dapat dilihat dalam Tabel 5.1

**Tabel 5.1. Pengujian Multikolinieritas**

NO	Variabel	VIF	Tolerance
1	PDRB	2,148	0,466
2	Jumlah Penduduk	4,407	0,227
3	Inflasi	1,211	0,826
3	Perubahan Peraturan	2,738	0,365

Sumber : Lampiran 14

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas. Kerena nilai VIF lebih kecil dari 10, dan nilai *tolerance* menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,1, artinya antara variabel independen tidak memiliki hubungan yang kuat dan signifikan.

## 2. Pengujian Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk memenuhi persyaratan model regresi bahwa data yang diperoleh memiliki sifat normal. Untuk pengujian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov satu arah menunjukkan bahwa nilai Z statistiknya tidak signifikan ( $> 0,05$ ), maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal, tampak seperti pada tabel 5.2.

Tabel 5.2

## Pengujian KOLMOGOROV SMIRNOV

NO	VARIABEL	LINEARITY
1	PDRB	0,125
2	Jumlah penduduk	0,835
3	Inflasi	0,837
4	Perubahan Peraturan	0,100

Sumber : Lampiran 15

### 3. Pengujian Heterokedastisitas

Pengujian model regresi untuk memiliki sifat efisien, efektif dan tidak bias kedua yaitu uji Glesjer, dengan cara membuat model regresi yang melibatkan nilai absolut residual, sebagai variabel dependen terhadap semua variabel bebas. Jika semua variabel independen signifikan secara statistik, maka dalam model terdapat heterokedastisitas

Tabel 5.3  
Pengujian Hetekesdastisitas

NO	Variabel	Sig.
1	PDRB	0.866
2	Jumlah Penduduk	0.902
3	Inflasi	0,950
4	Perubahan Peraturan	0.940

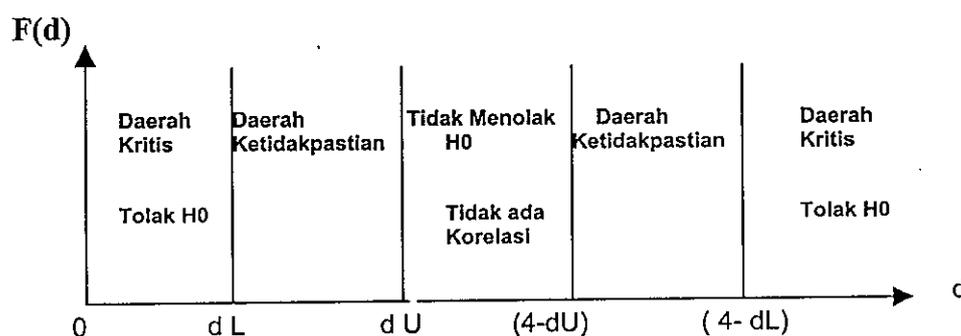
Sumber : Lampiran 16

Semua variabel independen tidak signifikan secara statistik berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model persamaan tersebut. Dengan

demikian model regresi yang diperoleh memiliki sifat efisien, efektif dan tidak bias, seperti yang dipersyaratkan dalam asumsi klasik.

#### 4. Pengujian Autokorelasi

Dengan adanya autokorelasi, maka taksiran tidak bias, tetapi akan terjadi underestimate terhadap variannya, sehingga prediksinya tidak efisien. Untuk pengujian autokorelasi ini dilakukan dengan uji d Durbin Watson (DW d Test) Hasilnya menunjukkan bahwa model empiris berada pada daerah ketidakpastian (tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti/ *inconclusive*). Untuk nilai ini, pada suatu tingkat signifikansi tertentu tidak dapat disimpulkan ada-tidaknya otokorelasi diantara faktor-faktor gangguan. Nilai D-W statistik adalah 1,183 (pada  $\alpha = 5\%$ ) terletak di atas nilai  $D_L = 0,90$  dan di bawah nilai  $D_U = 1,83$ . (Gunawan,2001:248)



Langkah yang dilakukan dalam pengujian adalah merubah hipotesis verbal yang telah ditetapkan di bab terdahulu menjadi hipotesis statistik, untuk pengujian digunakan hipotesis nol ( $H_0$ ).

Formula hipotesis statistik yang dirumuskan untuk pajak daerah ada 4 buah yaitu :

- $H_1$  :  $\beta_1 > 0$ , ada hubungan positif antara pajak daerah dengan PDRB
- $H_2$  :  $\beta_2 > 0$ , ada hubungan positif antara pajak daerah dengan jumlah penduduk
- $H_3$  :  $\beta_3 > 0$ , ada hubungan positif antara pajak daerah dengan inflasi
- $H_4$  :  $\beta_4 > 0$ , ada hubungan positif antara pajak daerah dengan perubahan peraturan

Keempat hipotesis tersebut diuji dengan analisis regresi linier berganda menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut (lihat lampiran 13) :

$$\text{Log } Y = -51,521 + 0,111 \log \text{PDRB} + 9,933 \log \text{JP} + 0,233 \log \text{Inf} + 0,272 \text{D}$$

t-hitung	=	-3,493	1,988	3,959	0,985	1,773
Sig.t	=	0,03	0,045	0,001	0,340	0,096
$R^2$	=	0,829				
$R^2$ adjusted	=	0,783				
F-hitung	=	13,153				
Signif.F	=	0,000				

Persamaan regresi di atas menunjukkan kesesuaian dengan model penelitian yang dikehendaki secara teoritis. Ini berarti bahwa penerimaan pajak sebagai variabel tergantung mempunyai hubungan yang searah atau positif dengan variabel bebasnya yaitu jumlah penduduk, PDRB, laju inflasi dan perubahan peraturan (UU No 18 tahun 1997)

Dari empat variabel diatas terdapat 2 variabel yang dinyatakan signifikan pada tingkat signifikansi 5 %, yaitu PDRB , jumlah penduduk . Untuk variabel inflasi dan perubahan peraturan ( D) secara statistik dinyatakan tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari Sig. t ( peluang galat) yang dihasilkan. Sig.t ini adalah proporsi atau persentase berlakunya  $H_1$  yang sekaligus menunjukkan proporsi atau persentase berlakunya  $H_0$  ( Sutrisno Hadi, 1994 : 133 )

Cara lain untuk membuktikan variabel-variabel tersebut signifikan atau tidak signifikan secara statistik, yaitu dengan uji t student, dimana t- Tabel untuk observasi 20 dan *level of significan* =5 % adalah 1,746. Dari hasil perhitungan, maka variabel inflasi dan perubahan peraturan dinyatakan tidak signifikan, sebab nilai t- hitung lebih kecil dibandingkan dengan t- Tabel .

Bagian penting dari prosedur statistik mengenai model dari data adalah menetapkan seberapa baik model tersebut secara nyata cocok ( goodness of fit ) sekaligus mendeteksi kemungkinan pelanggaran asumsi yang diperlukan dalam data yang sedang dianalisis.

Output sebagaimana tampak dalam tabel, menampilkan  $R^2$  ( R square) sebesar 0,829 dan akar kuadratnya atau multiple R sebesar 0,910 serta adjusted R square sebesar 0,783. Koefisien determinasi ini ( adjusted  $R^2$ ) untuk model ini menunjukkan 78,30 % variabel-variabel independent menjelaskan variabel dependent. Nyata tidaknya pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan dapat dilihat dari nilai sig. F dimana menunjukkan nilai yang kecil sekali, artinya  $H_1$  berpeluang 100 % dan  $H_0$  berpeluang 0 %. Cara lain yaitu

dengan membandingkan F hitung dengan F tabel,  $\alpha = 5\%$  dan derajat kebebasan (  $df = 4/15$ ) dimana F hitung  $18,153 > 3,06$ . Dengan demikian secara statistik dinyatakan ada pengaruh yang signifikan.

#### 5.1.1.2. Pengujian model

Untuk pengujian model dapat dilihat dalam tabel 5.4 berikut :

**Tabel 5.4**  
**Pengujian Model**

No	Variabel	Koefisien	Sig	Keterangan
1	PDRB	0,111	0,45	Signifikan
2	Jumlah Penduduk	9,933	0,001	Signifikan
3	Inflasi	0,233	0,340	Tidak signifikan
4	Perubahan Peraturan	0,272	0,096	Tidak Signifikan

Sumber : Lampiran 14

Selanjutnya analisis secara ekonomi terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut :

##### 1. Pengaruh PDRB

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya Produk Domestik Regional Bruto mampu mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan regresi, dengan koefisien regresi variabel PDRB sebesar 0,111.

Peningkatan PDRB secara riil, berarti kegiatan sektor-sektor dalam perekonomian mengalami peningkatan. Peningkatan sektor-sektor dalam kegiatan perekonomian ini mengakibatkan penerimaan pajak daerah. Hal

ini juga didukung oleh penelitian dari Lobo Bulo (2001), bahwa PDRB mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Sesuai dengan hasil perhitungan regresi, maka angka 0,111 tersebut artinya apabila terjadi kenaikan PDRB sebesar 1 (satu) persen, akan terjadi kenaikan penerimaan pajak daerah sebesar 0,111 persen.

## 2. Pengaruh Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Semarang mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil regresi yang menunjukkan angka 9,933. Angka ini berarti bahwa dengan kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 persen maka akan menyebabkan kenaikan penerimaan pajak daerah sebesar 9,933 persen.

## 3. Pengaruh Inflasi

Inflasi yang tidak signifikan dalam kaitannya dengan penerimaan pajak daerah bisa disebabkan karena beberapa faktor antara lain jumlah tahun data yang kurang, sehingga pengaruh inflasi tidak terlihat, selain itu dalam penelitian ini bersifat menyeluruh pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga inflasi pengaruhnya tidak begitu nampak.

## 4. Pengaruh Perubahan Peraturan ( UU No 18 tahun 1997 )

Peraturan mengenai perpajakan, yaitu UU no 18 tahun 1997 mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah pada  $\alpha = 5 \%$ . Tidak signifikannya ini bisa disebabkan karena masa berlakunya reformasi perpajakan dalam penelitian ini baru selama 5 tahun, jadi

pengaruhnya belum begitu terlihat, selain itu dalam kaitannya perubahan peraturan ini, pengaruh faktor ekonomi dan non ekonomi cukup banyak, sehingga pengaruh terhadap penerimaan pajak tidak terlihat. Selain itu perubahan peraturan ini hanya menyangkut jenis pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan di Kabupaten dan Propinsi, tidak menyangkut pada besaran tariff. Untuk penelitian yang sudah dilakukan oleh Jaka Sriyana (1999:109), menunjukkan adanya pengaruh reformasi perpajakan terhadap penerimaan daerah.

## **5.1.2. Penerimaan Retribusi Daerah**

### **5.1.2.1. Pengujian Asumsi Klasik**

Untuk memperoleh model *estimator linier* tidak bias yang terbaik, maka dilakukan uji asumsi klasik, yang meliputi uji multikolinearitas, normalitas, heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

#### **1. Uji Multikolinearitas**

Hasil regresi yang diperoleh melalui SPSS for windows diuji apakah memiliki sifat efisien, efektif dan tidak bias melalui pengujian non-multikolinieritas pada model persamaan regresi berganda tersebut, dengan menganalisis melalui nilai *variance inflating factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Batas VIF adalah 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1. Hasil yang diperoleh dengan bantuan SPSS tampak bahwa nilai VIF untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.5**  
**Pengujian Multikoleniaritas**

NO	Variabel	VIF	Tolerance.
1	PDRB	2,125	0,466
2	Jumlah Penduduk	4,402	0,227
3	Inflasi	1,110	0,826
3	Perubahan Peraturan	2,520	0,365

Sumber : Lampiran 18

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikoleniaritas. Karena nilai VIF lebih kecil dari 10, dan nilai tolerance menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,1, artinya antara variabel independen tidak memiliki hubungan yang kuat dan signifikan.

## 2. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk memenuhi persyaratan model regresi bahwa data yang diperoleh memiliki sifat normal. Untuk pengujian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov satu arah menunjukkan bahwa nilai Z statistiknya tidak signifikan ( $> 0,05$ ), maka dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal, tampak seperti pada tabel di bawah ini .

**Tabel 5.6**  
**Tabel Pengujian KOLMOGOROV SMIRNOV**

NO	VARIABEL	LINEARITY
1	PDRB	0,110
2	Jumlah Penduduk	0,785
3	Inflasi	0,827
4	Perubahan Peraturan	0,100

Sumber : Lampiran 19

### 3. Pengujian Heterokedastisitas

Pengujian model regresi untuk memiliki sifat efisien, efektif dan tidak bias kedua yaitu uji heteroskedastisitas dengan uji Glesjer

**Tabel 5.7**  
**Pengujian Heterokedastisitas**

NO	Variabel	Sig.
1	PDRB	0.865
2	Jumlah Penduduk	0.837
3	Inflasi	0.313
4	Perubahan Peraturan	0.921

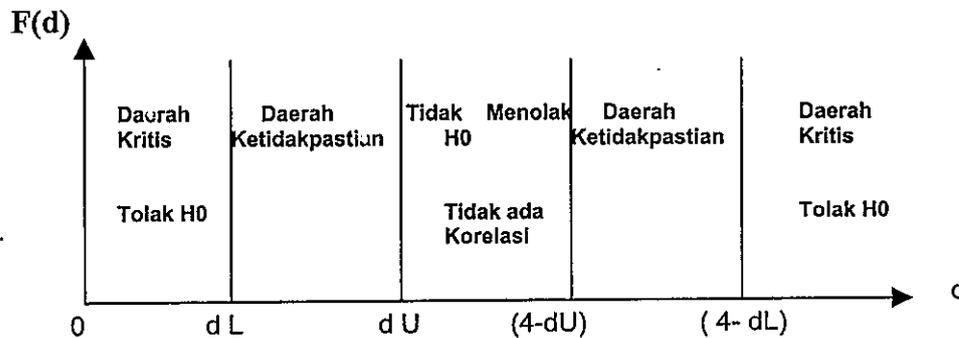
Sumber : Lampiran 20

Semua variabel independen tidak signifikan secara statistik berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model persamaan tersebut. Dengan demikian model regresi yang diperoleh memiliki sifat efisien, efektif dan tidak bias, seperti yang dipersyaratkan dalam asumsi klasik.

### 4. Pengujian Autokorelasi

Dengan adanya autokorelasi, maka taksiran tidak bias, tetapi akan terjadi *underestimate* terhadap variannya, sehingga prediksinya tidak efisien. Untuk pengujian autokorelasi ini dilakukan dengan uji *d* Durbin Watson ( *DW d Test* ) Hasilnya menunjukkan bahwa model empiris berada pada daerah ketidakpastian ( tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti/ *inconclusive* ). Untuk nilai ini, pada suatu tingkat signifikansi tertentu tidak dapat disimpulkan ada-tidaknya otokorelasi diantara faktor-faktor

gangguan. Nilai D-W statistik adalah 1,453 (pada  $\alpha = 5\%$ ) terletak di atas nilai  $D_L = 0,90$  dan di bawah nilai  $D_U = 1,83$ . (Gunawan, 2001:248)



Formula hipotesis statistik yang dirumuskan untuk retribusi daerah ada 4 buah yaitu :

- $H_1$  :  $\beta_1 > 0$ , ada hubungan positif antara retribusi daerah dengan PDRB
- $H_2$  :  $\beta_2 > 0$ , ada hubungan positif antara retribusi daerah dengan jumlah penduduk
- $H_3$  :  $\beta_3 > 0$ , ada hubungan positif antara retribusi daerah dengan inflasi
- $H_4$  :  $\beta_4 > 0$ , ada hubungan positif antara retribusi daerah dengan perubahan peraturan

Keempat hipotesis tersebut diuji dengan analisis regresi linier berganda menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut (lihat lampiran 17) :

Log RD	=	-65,107	+ 0,249 log PDRB	+ 11,845 log JP	+ 0,103 log Inf	+ 0,428 D
t-hit	=	-2,902	2,917	3,104	0,287	1,83
Sig.t	=	0,11	0,011	0,007	0,778	0,087
$R^2$	=	0,816				
$R^2$ adjusted	=	0,767				
F-hit	=	16,659				
Sig.F	=	0,000				

Persamaan regresi di atas sudah menunjukkan kesesuaian dengan model penelitian yang dikehendaki secara teoritis. Ini berarti bahwa penerimaan retribusi daerah memiliki pola hubungan searah atau positif dengan variabel bebasnya, hal ini dapat dibuktikan oleh tanda positif (+) dari semua koefisien regresornya.

Dari empat variabel di atas terdapat 2 variabel yang dinyatakan signifikan pada tingkat signifikansi 5 %, yaitu PDRB , jumlah penduduk . Untuk variabel inflasi dan perubahan peraturan ( D) secara statistik dinyatakan tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari Sig. t ( peluang galat) yang dihasilkan. Sig.t ini adalah proporsi atau persentase berlakunya  $H_1$  yang sekaligus menunjukkan proporsi atau persentase berlakunya  $H_0$  ( Sutrisno Hadi, 1994 : 133 )

Cara lain untuk membuktikan variabel-variabel tersebut signifikan atau tidak signifikan secara statistik, yaitu dengan uji t student, dimana t- Tabel untuk observasi 20 dan *level of significan* =5 % adalah 1,746. Dari hasil perhitungan, maka variabel inflasi dan perubahan peraturan dinyatakan tidak signifikan, sebab nilai t- hitung lebih kecil dibandingkan dengan t- Tabel .

Bagian penting dari prosedur statistik mengenai model dari data adalah menetapkan seberapa baik model tersebut secara nyata cocok ( goodness of fit ) sekaligus mendeteksi kemungkinan pelanggaran asumsi yang diperlukan dalam data yang sedang dianalisis.

Output sebagaimana tampak dalam tabel, menampilkan  $R^2$  ( R square) sebesar 0,816 dan Adjusted R square sebesar 0,767. Dengan demikian ketepatan model untuk menjelaskan fenomena cukup tinggi, yaitu sebesar 76,70 % berdasarkan R adjusted. Nyata tidaknya pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan dapat dilihat dari nilai sig. F dimana menunjukkan nilai yang kecil sekali, artinya  $H_1$  berpeluang 100 % dan  $H_0$  berpeluang 0 %. Cara lain yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel,  $\alpha = 5 \%$  dan derajat kebebasan (  $df = 4/15$ ) adalah 5,86. Nilai F hitung sebesar  $16,659 > 3,06$ , dengan demikian secara statistik dinyatakan ada pengaruh yang signifikan.

#### 5.1.2.2. Pengujian model

Untuk pengujian model dapat dilihat dalam tabel 5.8. berikut :

**Tabel 5.8**  
**Pengujian Model**

No	Variabel	Koefisien	Sig	Keterangan
1	PDRB	0,249	0,011	Signifikan
2	Jml Penduduk	11,845	0,007	Signifikan
3	Inflasi	0,103	0,778	Tidak Signifikan
4	Perubahan Peraturan	0,428	0,087	Tidak Signifikan

Sumber : Lampiran 18

Selanjutnya analisis secara ekonomi terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah sebagai berikut :

#### 1. Pengaruh PDRB

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penerimaan retribusi daerah. Artinya Produk Domestik Regional Bruto mampu mempengaruhi penerimaan retribusi daerah . Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan regresi, dengan koefisien regresi variabel PDRB sebesar 0,249. Peningkatan PDRB secara riil, berarti kegiatan sektor-sektor dalam perekonomian mengalami peningkatan. Sesuai dengan hasil perhitungan regresi, maka angka 0,249 tersebut artinya apabila terjadi kenaikan PDRB sebesar 1 (satu) persen, akan terjadi kenaikan retribusi daerah sebesar 0,249 persen.

#### 2. Pengaruh Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan retribusi daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil regresi yang menunjukkan angka 11,845. Angka ini berarti bahwa dengan kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 persen maka akan menyebabkan kenaikan penerimaan retribusi daerah sebesar 11,845 persen.

### 3. Pengaruh Inflasi

Inflasi yang tidak signifikan dalam kaitannya dengan penerimaan retribusi daerah bisa disebabkan karena beberapa faktor antara lain jumlah tahun data yang kurang, sehingga pengaruh inflasi tidak terlihat.

### 4. Pengaruh Perubahan Peraturan ( UU No 18 tahun 1997 )

Peraturan mengenai perpajakan, yaitu UU no 18 tahun 1997 tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan retribusi daerah pada  $\alpha = 5 \%$ . Peraturan perpajakan ini tidak berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah, karena banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap penerimaan retribusi, baik faktor ekonomi dan non ekonomi

## 5.2. Analisis Overlay

### 5.2.1. Pajak Daerah

Untuk melihat pajak dan retribusi daerah yang potensial digunakan analisis overlay, dari hasil perhitungan diperoleh bahwa ada beberapa jenis pajak daerah yang masuk katagori prima, potensial, berkembang dan terbelakang, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan Tingkat Pertumbuhan dan kontribusi  $\geq 1$ , dikatakan pajak daerah tersebut prima, jika pertumbuhan rendah dan kontribusi tinggi dikatakan potensial. Apabila pertumbuhan tinggi dan kontribusi rendah dikatakan pajak tersebut berkembang, sedangkan jika pertumbuhan dan kontribusi rendah maka pajak daerah tersebut dikategorikan terbelakang.

Pajak daerah yang dikategorikan prima di Kota Semarang adalah pajak penerangan jalan , pajak hotel dan restoran serta pajak lainnya. Namun karena pajak lainnya tidak menunjukkan spesifikasi yang jelas dalam UU no 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ataupun dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 18 tahun 1997, maka yang dapat dikategorikan prima hanyalah Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hotel dan Restoran. Kriteria prima bagi pajak penerangan jalan dan pajak hotel dan restoran ini artinya pajak ini dominan baik dari pertumbuhan maupun kontribusinya bagi penerimaan Kota Semarang. Sedangkan pajak yang potensial adalah Pajak Pembangunan ( sebelum UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah). Beberapa jenis pajak daerah sudah tidak dikenakan sejak Undang-undang No 18 Tahun 1997, seperti pajak radio, pajak bangsa asing, pajak anjing dan sebagainya. Untuk melihat perhitungan overlay selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 5.9

**Tabel 5.9**  
**Perhitungan Overlay Untuk Pajak Daerah**

No	Jenis Pajak Daerah	Koefisien Pertumbu- han (DXi /DX)	Koefisien Kontribusi (Xi /X)	Kriteria
1	Pajak Potong Hewan	1.59	0.02	Berkembang
2	Pajak Pembangunan	0	3.01	Potensial
3	Pajak Radio	29.77	0.00	Berkembang
4	Pajak Bangsa Asing	-0.41	0.04	Terbelakang
5	Pajak Atas Ijin Menangkap Ikan di Perairan Teritorial	0	0	
6	Pajak atas pertunjukan dan keramaian umum	0.19	3.59	Terbelakang
7	Pajak reklame	1.63	0.62	Berkembang
8	Pajak Anjing	-0.09	0.00	Terbelakang
9	Pajak Pembikinan/ penjualan petasan	0	0.	
10	Pajak Penjualan yang mengandung Alkohol	0.24	0.00	Terbelakang
11	Pajak dari Pengusahaan Meja billiard	6.31	0.05	Berkembang
12	Pajak Kendaraan Tidak Bermotor	0.06	0.01	Terbelakang
13	Pajak Tanda kemewahan Kuburan	0.	0.	
14	Pajak Atas Milik	0	0	
15	Pajak penerangan Jalan	1.22	3.9	Prima
16	Pajak Rumah Bola	1.02	0.11	Berkembang
17	Pajak Forensen	0	0.06	Terbelakang
18	Pajak Pendaftaran Perusanaan	0.52	0.11	Terbelakang
19	Pajak Perusahaan	0.74	0.07	Terbelakang
20	Pajak Kendaraan Di Atas Air	0.	0	
21	Pajak Pengambilan Sarang Burung	0	0	
22	Pajak-pajak lainnya	53.58	1.31	Prima
23	Pajak Hotel dan Restoran	1.53	2.16	Prima
24	Pajak Hiburan	1.59	0.32	Berkembang
25	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol., C	17.97	0.00	Berkembang
26	Pajak ABT	1.62	0.20	Berkembang
27	Opsen Atas Pajak DT I	-0.84	0.14	Terbelakang
28	Pajak dari perusahaan Alat Ketrampilan	0	0.07	Terbelakang
29	Pajak Permainan Anak-anak	0	0.04	Terbelakang

Sumber; Semarang Dalam Angka 1983 –2000 dan DPKD 2002, diolah

### 5.2.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah di Kota Semarang, berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi menunjukkan bahwa retribusi yang potensial untuk dikembangkan sebagai sumber penerimaan daerah adalah retribusi pangkalan, retribusi sepadan/ijin bangunan, retribusi rumah sakit/ puskesmas, retribusi parkir, retribusi sampah. Kriteria potensial ini berarti pertumbuhan dari retribusi ini dibawah satu, sedangkan kontribusinya tinggi. Retribusi jenis ini masih bisa diharapkan sebagai sumber penerimaan daerah yang potensial, karena besarnya kontribusi yang diberikan. Namun berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 1997, retribusi pangkalan sudah ditiadakan- sehingga tidak bisa dikembangkan sebagai sumber penerimaan daerah. Sedangkan Retribusi sepadan/ ijin bangunan diganti menjadi Ijin Mendirikan Bangunan. Beberapa jenis retribusi dikategorikan berkembang yaitu : ijin pekerjaan pemborongan, pengeluaran hasil ternak dan unggas, retribusi lainnya, retribusi air bersih, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi ijin gangguan. Kategori berkembang artinya jenis retribusi ini mempunyai tingkat pertumbuhan di atas 1, namun kontribusinya rendah. Untuk retribusi dengan kategori terbelakang artinya retribusi tersebut mempunyai angka yang rendah (dibawah satu), baik untuk pertumbuhan maupun kontribusinya. Yang dikategorikan terbelakang antara uang leges, uang dispensasi jalan, uang sewa tanah, dan lain-lain. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 5.10.

**Tabel 5.10**  
**Perhitungan Overlay Untuk Retribusi Daerah**

No	Jenis Retribusi	Koefisien Pertum- buan (DXi/DX)	Koefisien Kontribu- si/X)	Kriteria
A.	Retribusi Jasa Umum			
1	Uang Leges	0.02	0.10	Terbelakang
2	Uang Dispensasi Jalan	(0.20)	0.95	Terbelakang
3	Uang Pangkalan	0.59	2.28	<b>Potensial</b>
4	Uang Penambakan / Rakit Penyeberangan	0.66	0.00	Terbelakang
5	Uang Pemeriksaan/ Pembantaian	(0.83)	0.06	Terbelakang
6	Uang Sewa Tanah/ Bangunan	0.09	0.05	Terbelakang
7	Uang Sepadan/ Ijin Bangunan	(0.06)	2.71	<b>Potensial</b>
8	Uang Atas Pemakaian Tanah	0.18	0.50	Terbelakang
9	Uang Penguburan	0.70	0.02	Terbelakang
10	Pemberian Ijin Perusahaan Perindustrian Kecil	0.65	0.00	Terbelakang
11	Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor	(0.83)	0.01	Terbelakang
12	Jembatan Timbang	(0.06)	0,00	Terbelakang
13	Uang Terminal ( Bus, Non Bus, taksi)	0,00	0.56	Terbelakang
14	Rumah Sakit, Balai Pengobatan dan Puskesmas	0.77	1.72	<b>Potensial</b>
15	Tempat Rekreasi	0.85	0.09	Terbelakang
16	Reklame, Spanduk dan Poster	0	0.03	Terbelakang
17	Pasar	0.3	3.32	<b>Potensial</b>
18	Pesanggrahan, Losmen dan Hotel	(0.83)	0.04	Terbelakang
19	Pengeluaran Hasil Pertanian, Hutan dan Laut	-	-	
20	Pemeriksaan Susu	0.16	0.01	Terbelakang
21	Parkir	0.18	1.19	<b>Potensial</b>
22	Sampah/ Kebersihan lainnya	0.82	2.21	<b>Potensial</b>
23	Sumbangan Wajib Rehabilitasi Prasarana Jalan	(1,66)	0.02	Terbelakang
24	Sewa Rumah, Gedung, Kost, Pondokan, Asrama	(0.83)	0.00	Terbelakang
25	Pemeriksaan dan Pengawasan Kulit	(1,93)	0.00	Terbelakang
26	Film dan Hiburan/ Pajak Karcis Totonan	(2,12)	0.01	Terbelakang
27	Ijin Prakuilifikasi Dokumen Rekanan Usaha	0	0	Terbelakang
28	Ijin Pekerjaan Pemborongan	97,1	0.12	<b>Berkembang</b>
29	Wajib Uji Barang/ Uji Tera	(0,52)	0.09	Terbelakang

Tabel 5.10 Lanjutan

30	Pengeluaran Hasil Ternak dan Unggas	3,78	0.00	<b>Berkembang</b>
31	Agen Pariwisata dan Biro Perjalanan	-	-	
32	Administrasi KTP, Surat Jalan dan Akte Kelahiran	0,20	0.44	Terbelakang
33	Penerbitan Sertifikat Tanah/ dari Agraria	(0,83)	0.09	Terbelakang
34	Usaha Retribusi Kaki Lima	(1,66)	0.62	
35	Retribusi Lainnya	4,70	0.01	<b>Berkembang</b>
36	Ijin Trayek	(0,83)	0.03	Terbelakang
38	Uang Pemeriksaan Lebel	(0,94)	0.00	Terbelakang
39	Uang Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung	(0,66)	0.05	Terbelakang
40	Rekomendasi Ijin HO	(0,48)	0.25	Terbelakang
41	Retribusi Pengendalian Lingkungan	(1,66)	0.03	Terbelakang
42	Retribusi Kaki Lima	0,07	0.11	Terbelakang
43	Retribusi Peron Terminal Terboyo	(0,87)	0.31	Terbelakang
44	Pemberian Ijin Perusahaan Tambak Ikan	(0,83)	0.00	Terbelakang
45	Pengerukan/ Penyedotan Kakus	0,52	0.00	Terbelakang
46	Pelelangan Ikan	(1,56)	0.00	Terbelakang
47	Bahan Galian Golongan C	(0,83)	0.01	Terbelakang
48	Pemakaian Air Tanah dan Pemakaian Air Bukan Tanah	(0,83)	0.02	Terbelakang
49	Tuslah Pengujian Kendaraan Tak Bermotor	(0,62)	0.11	Terbelakang
50	Karantina dan Sanitasi	(0,06)	0.00	Terbelakang
51	Penomoran Rumah	(0,09)	0.00	Terbelakang
52	Dana Planning	(0,46)	0.12	Terbelakang
53	Pemeriksaan/ Pemasangan kabel pada Alat pemadam kebakrn	(0,18)	0.00	Terbelakang
54	Retribusi Puskesmas	0,11	0.12	Terbelakang
55	Pemeriksaan Ulang daging	(0,37)	0.00	Terbelakang
56	Kendaraan Air	(0,09)	0.00	Terbelakang
57	Pelabuhan	(0,09)	0.00	Terbelakang
58	Steambath, Night Club	(0,50)	0.21	Terbelakang
59	Bola Sodik	1,12	0.01	Terbelakang
60	Sumbangan Listrik	0	0	Terbelakang
61	Retribusi Air Bersih	1.19	0.00	<b>Berkembang</b>
62	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0.42	0.00	Terbelakang
63	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta <b>b. Retribusi Jasa Usaha</b>	1.01	0.16	<b>Berkembang</b>
64	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.44	0.14	<b>Berkembang</b>

Tabel 5.10 Lanjutan

65	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	0,52	0.16	Terbelakang
66	Retribusi Terminal	0.43	0.18	Terbelakang
67	Retribusi Tempat Khusus Parkir	(0,65)	0.05	Terbelakang
68	Retribusi Tempat Penitipan Anak	-		
69	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	
67	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Vila	0.66	0.02	Terbelakang
68	Retribusi Penyedotan Kakus	2.24	0.01	<b>Berkembang</b>
69	Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	
70	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal	0.61	0.09	Terbelakang
71	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	0.39	0.05	Terbelakang
72	Retribusi Penyeberangan Di Atas Air	-	-	
73	Retribusi Pengolahan Limbah Air	-	-	
	<b>c. Retribusi Perijinan Tertentu</b>			
74	Retribusi Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah	0.93	0.27	Terbelakang
75	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	23.98	0.28	Terbelakang
76	Retribusi Izin Trayek	0.48	0.12	Terbelakang
77	Retribusi Izin Gangguan	1.86	0.14	<b>Berkembang</b>
78	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-	-	
79	Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Iktan	0.93	0.74	Terbelakang

Sumber: Semarang Dalam Angka ,diolah

### 5.3. Proyeksi

Proyeksi Penerimaan dari pajak dan retribusi daerah dapat dipergunakan untuk melihat penerimaan dari pajak dan retribusi ini di masa mendatang. Dengan hasil dari overlay terhadap pajak dan retribusi daerah, kemudian diproyeksikan, namun yang diproyeksikan hanya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang prima dan potensial. Perhitungan proyeksi untuk pajak penerangan jalan dapat dilihat dalam lampiran 21 dan lampiran 22. Proyeksi untuk pajak hotel

dan restoran dapat dilihat dalam lampiran 23 dan 24. Perhitungan proyeksi untuk retribusi pasar, sampah, rumah sakit, parkir dan IMB daerah pada lampiran-lampiran berikutnya

**Tabel 5.11**  
**Proyeksi Pajak Daerah Yang Prima dan Potensial**

No	Jenis Pajak Daerah	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Pajak Penerangan Jalan	37.065.507.453,39	45.765.671.624,87	56.507.973.131,35	69.771.750.616,63	86.148.855.008,37	106.370.058.851,36
2	Pajak Hotel Dan Restoran	23.508.318.387,80	26.226.019.066,60	28.943.719.745,40	31.661.420.424,20	34.379.121.103,00	37.096.821.781,80

Sumber: Data Diolah

**Tabel 5.12**  
**Proyeksi Retribusi Daerah Yang Potensial**

No	Jenis Daerah	Retribusi	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	Pasar		3.491.293.226,08	3.645.078.734,47	3.798.864.242,86	3.952.649.751,25	4.106.435.259,65	4.260.220.768,04
2	Sampah		4.792.246.790,14	5.136.878.594,41	5.481.510.398,68	5.826.142.202,95	6.170.774.007,21	6.515.405.811,48
3	Parkir		683.883.819,07	693.697.551,88	703.652.111,74	713.749.519,55	723.991.825,15	734.381.107,84
4	Rumah Sakit		7.074.731.407,45	9.011.792.866,81	11.479.221.753,74	14.622.232.669,92	18.625.799.974,94	23.725.544.008,08
5	IMB		4.521.663.058,40	5.236.459.801,40	5.951.256.5433,60	6.666.053.286,20	7.380.850.028,80	8.095.646.771,40

Sumber: Data Diolah

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Simpulan

Berdasarkan pengamatan, baik secara kualitatif, maupun secara kuantitatif yang dilandasi dengan teori, tujuan dan hipotesis penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Analisa Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa variabel PDRB, jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. Artinya setiap terjadi perubahan pada kedua variabel independen tersebut, maka variabel dependen akan mengalami perubahan sebesar koefisien dan searah. Variabel inflasi dan perubahan peraturan (UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah) menunjukkan tidak signifikan pada  $\alpha = 5\%$ . Hasil estimasi regresi pada pajak daerah menunjukkan koefisien regresi untuk PDRB sebesar 0,111 dan 9,933 untuk jumlah penduduk, hal itu berarti apabila terjadi kenaikan 1 persen pada variabel PDRB dan jumlah penduduk akan menyebabkan kenaikan penerimaan pajak daerah sebesar 0,111 persen dan 9,933 persen. Sedangkan tidak signifikannya variabel Dummy pada  $\alpha = 5\%$  berarti tidak ada pengaruh penetapan UU no. 18 Tahun 1997 terhadap penerimaan Pajak Daerah

Hasil analisis regresi pada retribusi daerah menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,249 untuk PDRB; 11,845 untuk Jumlah Penduduk dan 0,103 untuk inflasi serta 0,428 untuk Perubahan Peraturan. Hal itu berarti apabila terjadi kenaikan sebesar 1 persen untuk masing-masing variabel akan menyebabkan kenaikan retribusi daerah sebesar 0,249 persen untuk PDRB dan 11,845 persen untuk jumlah penduduk. Perubahan peraturan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada  $\alpha = 5\%$ , karena perubahan peraturan ini baru berlaku selama lima tahun, sehingga belum nampak pengaruhnya terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah, begitu juga untuk variabel inflasi.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah PDRB dan jumlah penduduk. Untuk variabel perubahan peraturan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada  $\alpha = 5\%$ , begitu juga dengan inflasi. Penelitian ini bersifat menyeluruh pada seluruh penerimaan pajak dan retribusi daerah, sehingga inflasi pengaruhnya tidak begitu nampak. Sedangkan perubahan peraturan tidak mempunyai pengaruh yang cukup berarti karena masa berlakunya dari perubahan peraturan ini baru lima tahun, sehingga pengaruh pada penerimaan pajak dan retribusi tidak nampak. Selain itu perubahan peraturan ini hanya menyangkut jenis pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan untuk Kabupaten dan Propinsi, tidak menyangkut pada besaran tarif, sehingga secara keseluruhan penerimaan pajak dan retribusi tidak terpengaruh oleh perubahan peraturan ini.

3. Dibandingkan dengan penelitian yang terdahulu, ada variabel yang sama pengaruhnya terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah, yaitu PDRB dan Jumlah Penduduk. Variabel Peraturan Daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah, sementara pada penelitian Jaka Sriyana menunjukkan bahwa reformasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap PAD.

#### 4. Analisis Overlay

Berdasarkan analisis overlay didapatkan bahwa pajak daerah yang potensial untuk dikembangkan di Kota Semarang adalah :

Pajak yang dikategorikan prima adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak lainnya. Sedangkan Pajak yang potensial adalah Pajak Pembangunan..

Sedangkan retribusi yang potensial adalah Retribusi Pangkalan, Retribusi Ijin Bangunan, Retribusi Rumah Sakit, Balai Pengobatan dan Puskesmas, Retribusi Parkir, Retribusi Sampah/ Kebersihan Lainnya.

5. Proyeksi yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial dan sesuai dengan UU No 18 tahun 1997 saja yang diproyeksikan, karena beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sudah tidak diberlakukan lagi. Semua jenis pajak menunjukkan trend kenaikan, namun untuk jenis retribusi ada yang menunjukkan penurunan, yaitu retribusi parkir.

## 6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Semarang dapat meningkatkan penerimaan daerah dari pajak daerah dan retribusi yang potensial, sehingga saran yang penulis usulkan adalah :

- a. Melihat jumlah penduduk dan PDRB riil Kota Semarang, yang sangat dominan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Semarang, maka beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah memprioritaskan sektor-sektor potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain melalui sektor perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan serta jasa-jasa, dll. Diharapkan agar masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan dan memperkecil ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- b. Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang harus benar-benar dikembangkan antara lain melalui iklim yang kondusif dalam penanaman modal/investasi. Diharapkan melalui kegiatan investasi dapat meningkatkan arus modal masuk yang pada akhirnya dapat mendukung dan menumbuhkembangkan sektor perekonomian Kota Semarang.
- c. Jumlah penduduk mempunyai dampak yang positif selama dapat menimbulkan dan meningkatkan permintaan agregat. Hal ini dapat terjadi jika daya beli masyarakat tinggi, dan ini bisa tercapai jika pertumbuhan ekonomi juga menunjang. Sehingga yang perlu dilakukan adalah mengusahakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga menghasilkan daya beli yang tinggi pada masyarakat.

## 6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Semarang dapat meningkatkan penerimaan daerah dari pajak daerah dan retribusi yang potensial, sehingga saran yang penulis usulkan adalah :

- a. Melihat jumlah penduduk dan PDRB riil Kota Semarang, yang sangat dominan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Semarang, maka beberapa hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan beberapa sektor yang mendukung pertumbuhan pajak dan retribusi daerah di Kota Semarang, antara lain sektor perdagangan-hotel dan restoran, industri pengolahan serta jasa-jasa
- b. Meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor dalam PDRB Kota Semarang, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. Peningkatan pertumbuhan PDRB ini didukung oleh banyak faktor, misalnya kebijakan, alokasi dana dan investasi.
- c. Jumlah penduduk mempunyai dampak yang positif selama dapat menimbulkan dan meningkatkan permintaan agregat. Hal ini dapat terjadi jika daya beli masyarakat tinggi, dan ini bisa tercapai jika pertumbuhan ekonomi juga menunjang. Sehingga yang perlu dilakukan adalah mengusahakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga menghasilkan daya beli yang tinggi pada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Benyamin Haritz, 1995, "Peran administrasi Pemerintah Daerah : Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Se- Jawa Barat", **Prisma Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial**, No 4, 81-95.
- BPS, DIY, 2001, Penyesuaian Tahun Dasar, Brosur
- Davey, K.J., 1998, "Pembiayaan Pemerintah Daerah - Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga", Penerjemah Amanullah dkk, UI Press, Jakarta.
- Dumairy, 1996, **Perekonomian Indonesia**, Erlangga, Jakarta
- Devas, N., Binder, B., Both, A., Davey, K., Kelly, R., 1989, "Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia", Edisi Terjemahan, UI Press, Jakarta.
- Endang Koswara., 2000, "Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 1999 : Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya", **CSIS XXIX No.1**, Jakarta.
- Elita Bharantika, B., 1999, "Klasifikasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Yang Potensial Untuk Dikembangkan dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Upaya Peningkatannya di Kabupaten Dati II Jayapura", Tesis S-2, Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Faried Wijaya., 1992, **Seri Pengantar "Ekonomika Makro"**, BPFE, Edisi 3, Yogyakarta
- Gujarati, N. Damodar, 1995, "Basic Econometric", Mc Graw-Hill, Inc., Tokyo- Toronto, Etc.
- Gunawan Sumodiningrat, 2001, "Ekonometrika Pengantar, BPFE, Edisi 1, Yogyakarta
- Guritno Mangkoesobroto, 2001, "Ekonomi Publik", Edisi III BPFE, Yogyakarta
- Hg. Suseno T Widodo, 1990 "Indikator Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia", Kanisius, Yogyakarta.
- Ibnu Syamsi, 1987, "Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara", PT Bina Aksara, Jakarta.
- Irawan, M. Suparmoko, 1992, "Ekonomika Pembangunan", BPFE, Edisi 5, Yogyakarta.

- Insukindro, Mardiasmo, W. Widayat, W.K. Jaya, B.M Purwanto, A.Halim, J. Suprianto, A.B. Purnomo, 1994, "**Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**", Buku I, KKD FE UGM, Yogyakarta.
- Insukindro, 1995, **Ekonomi, Uang dan Bank**, BPFE, Yogyakarta.
- J Panglima Saragih, 1996, "Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan", **Majalah Perencanaan Pembangunan, No.6, 36-40.**
- Jaka Sriyana, 1999, "Hubungan Keuangan Pusat- Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah", **Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 4, No 1, 102-113**
- J Supranto, 1992, "**Statistik Teori dan Aplikasi**", Erlangga, Jakarta
- Kaho, J.R., 1997, "**Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**", PT. Raja Graatondo, Cetakan Ke-empat, Jakarta.
- Lee, D.R., and Snow, A., 1997, "Political Incentives and Optimal Taxation", **Public Finance Review, Vol.25, 491-508.**
- Living Stone, Ian and Charlton, Roger, 1998, "Raising Local Authority District Revenues Through Direct Taxation in A Low-Income Developing Country : Evaluation Uganda's GPT", **Public Administration and Development, Vol.18, No.5, December, 499-517.**
- Lobo Bulo, 2002, "**Hubungan Antara Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap PAD di Propinsi DKI Jakarta**", tesis S-2, PascaSarjana UGM, Yogyakarta
- Mardiasmo dan Makhfath, Ahmad, 2000, "**Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang**", Laporan Akhir Kerjasama Pemda Magelang dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo, A. Makhfath, B. Supomo, H. Purwanto., 2000, "**Pengembangan Model Standar Analisa Belanja (SAB) Anggaran Daerah (APBD)**", Laporan Akhir, PAU-SE UGM, Yogyakarta.
- Meier, M.G., 1995, "**Leading Issues in Economics Development**", Sixth Edition, Mc Graw-Hill, International Edition Finance Series, Singapore.
- Miller, Stephen M., and Frank S. Russek, 1997, "Fiscal Structure and Economics Growth at The State and Local Level", **Public Finance Review, Vol.25 No.2, 213-237.**
- Mudrajad Kuncoro, 1987, **Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi**, UPP AMP YKPN, Yogyakarta

- Munawir, S., 1997, "**Pokok-pokok Perpajakan**", Liberty, Yogyakarta.
- Nicholas Waroy, 1997, "**Analisis Potensi Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Berkaitan Dengan Otonomisasi Dati II Sorong**", Tesis S-2, Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Queen, Mc. Jim, 1998, "Development of a Model for User Fees a Mode on Policy Development in Creating and Maintening User Fees for Municipolities", MPA **Research Paper, Submitted to : The Local Government Program, Dept of Political Science, The University of Western Ontario, Aug.1998, 1-23.**
- Republik Indonesia, 2001, "**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**", CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Repubhk Indonesia, 2001, "**Peraturan Pemerintah RI No.65 Tentang Pajak Daerah**", CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Republik Indonesia, 2001, "**Peraturan Pemerintah RI No.66 Tentang Retribusi Daerah**", CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Republik Indonesia, 1999, "**Undang-Undang Otonomi Daerah 1999**", Sinar Grafika, Jakarta.
- Riant D. Nugroho, 2000, "**Otonomi : Desentralisasi Tanpa Revolusi – Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia**", PT Elexmedia Komputindo, Jakarta.
- Rochmat Soemitro,1990, "**Asas dan Dasar Perpajakan 1**", PT Eresco, Bandung
- Sudjana, 1981," **Statistika Untuk Ekonomi dan Niaga**", Tarsito, Bandung
- Sukanto Reksohadiprojo, 1999, "Government of Indonesia tax Revenues", **JEBI, Vol.14 No.4, 1-3.**
- Sumitro Djojohadikusumo,1994, "**Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan**", LP3ES, Jakarta
- Sutrisno Hadi,1994, **Buku Manual SPS ( Seri Program Statistik) Paket Midi**, Universitas Gajah Mada9 UGM), Yogyakarta
- 'Stiglitz Joseph E, " The Roll of Government in Economic Development", **annual World Bank Conference on Development Economic.**

Suparmoko, 1991, "**Pengantar Ekonomika Makro**", Edisi 5, BPFE, Yogyakarta.

Suparmoko, 2000, "**Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek**", Edisi 5, BPFE, Yogyakarta.

Wahyu Widayat, 1994, "Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah", **jurnal Akuntansi dan Manajemen, STIE YKPN, XXI/No.3, 28-34.**

W.K. Jaya, 1996, "**Analisis Keuangan Daerah : Pendekatan Makro**", Model Program PMSES, Kerjasama Ditjen PUOD Depdagri dengan Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Bisnis, UGM, Yogyakarta.